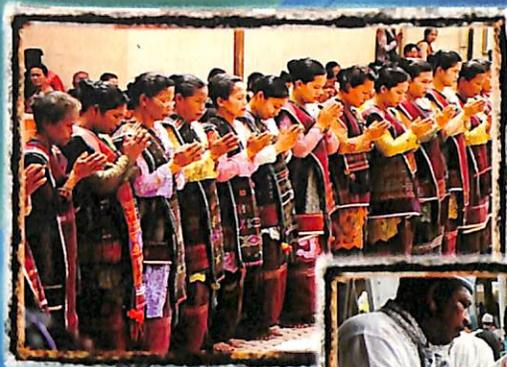
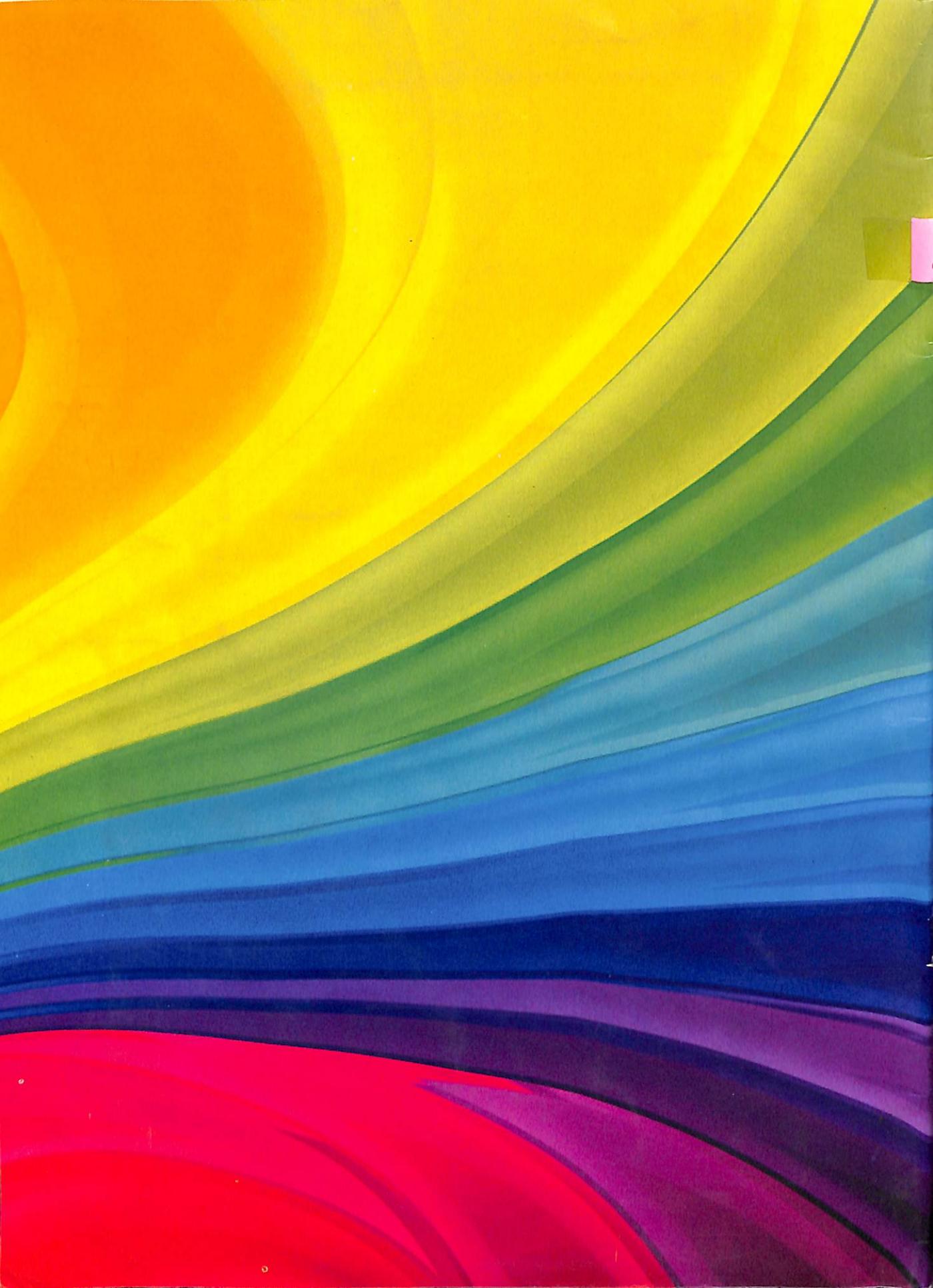


Buletin

H a b a



Harmonisasi Dalam Kehidupan Berbangsa



H a b a

Informasi Kesejarahan
dan Kenilaitradisional

No. 66 Th. XIII
Edisi Januari – Maret 2013

PELINDUNG

Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh

DEWAN REDAKSI

Rusjdi Ali Muhammad
Rusdi Sufi
Aslam Nur

REDAKTUR PELAKSANA

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
Essi Hermaliza
Cut Zahrina
Hasbullah
Agung Suryo Setyantoro

SEKRETARIAT

Kasubag Tata Usaha
Bendaharawan
Yulhanis
Razali
Ratih Ramadhani
Santi Shartika

ALAMAT REDAKSI

Jl. Tuanku Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp. (0651) 23226-24216 Fax. (0651)23226
Email : bpnbbandaaceh@yahoo.com
Website : www.bpnbbandaaceh.com.

Diterbitkan oleh :

Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh dari pembaca 7-10 halaman diketik 2 spasi, Times New Roman 12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Bagi yang dimuat akan menerima imbalan sepiantasnya.

ISSN : 1410 - 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info Budaya

Inventarisasi Karya Sastra Sabang

Wacana

Sudirman

Strategi Keharmonisan Hidup Dalam Perspektif Budaya Aceh

Hasbullah

Melestarikan Harmoni Dalam Bingkai NKRI: Melerai Pro-Kontra Bendera dan Lambang Daerah

Nasrul Hamdani

Batak Melayu: Simbol Adaptasi Harmonis Dari Sumatera Timur

Cut Zahrina

Ketokohan Iskandar Muda Dalam Membina Keharmonisan Kerajaan Aceh Darussalam (1607-1636)

Titit Lestari

Local Wisdom, Instrumen Peredam Konflik

Yulhanis

"*Paguee Gampong*" Dalam Masyarakat Aceh

Pustaka

Organisasi Sosial Masyarakat Mandailing di Medan

Cerita Rakyat

Boi Bile Huku

Cover

Harmonisasi

Tema Haba No. 67 Kearifan Lokal di Aceh-Sumatera Utara

PENGANTAR

Redaksi

Sebagai salah satu media publikasi di Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, Buletin Haba memiliki tanggungjawab menerbitkan tulisan dari para penulis di Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh dan penulis tamu yang konsen terhadap sejarah dan nilai budaya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Di awal tahun 2013, Buletin Haba No. 66 tampil dengan tema Harmonisasi Dalam Kehidupan Berbangsa. Edisi ini, mengangkat isu-isu sosial lokal di Aceh dan Sumatera Utara terkait keharmonisan dalam kehidupan berbangsa yang semestinya berdampak pada kesatuan bangsa. Para penulis telah berhasil menjabarkan tema ini menjadi wacana kelokalan seperti, *pageu gampong*, kearifan tradisional yang dapat menjadi instrumen peredam konflik, pro-kontra bendera dan lambang Aceh, dan sebagainya.

Artikel-artikel yang dimuat dalam Haba kali ini mewakili pandangan umum tentang berbagai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat menurut kaca mata penulis secara pribadi tanpa terikat tema sempit yang ditentukan oleh redaktur. Seluruh artikel dan rubrik lainnya dalam terbitan ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai sejarah dan budaya yang secara spesifik mengangkat nilai kelokalan yang menunjukkan isu-isu harmonisasi kebangsaan pada masyarakat. Semoga sejumlah artikel yang telah berhasil disusun dan dimuat dalam Buletin Haba No.66/2013 bermanfaat bagi pembaca.

Redaksi

INVENTARISASI SASTRA LISAN DI KOTA SABANG

Cerita rakyat dalam bidang kesusasteraan digolongkan ke dalam folklor. Folklor dapat didefinisikan sebagai kreasi masyarakat yang tradisional dengan menggunakan bunyi dan kata-kata dalam bentuk puisi atau prosa dan meliputi juga kepercayaan dan ketakhayulan. Cerita rakyat telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk tradisi lisan yang terus eksis sampai sekarang.

Sebagaimana diketahui, hampir semua negeri memiliki cerita rakyat, demikian pula Sabang. Dari hasil diskusi bersama Narasumber dari Dewan Kesenian Aceh di Sabang, telah dapat diinventarisir beberapa cerita sebagai berikut:

1. *Legenda Pulau Weh*

Dahulu kala, Pulau Weh pada mulanya bersatu dengan Pulau Sumatera. Namun Tuhan berkata lain, dalam sebuah gempa bumi yang dahsyat, keduanya terpisah seperti kondisi sekarang yang berjarak 18 mil. Akibat gempa itu pula, Pulau Weh keadaannya menjadi tandus dan gersang.

Lalu ada seorang putri jelita di Pulau Weh yang meminta pada Tuhan agar Pulau Weh tidak gersang seperti itu lagi. Lalu putri tersebut membuang seluruh perhiasannya ke laut sebagai sesembahannya. Tidak lama kemudian hujan pun turun, disusul gempa bumi yang juga lumayan dahsyat. Akhirnya terbentuklah sebuah danau yang kemudian diberi nama Aneuk Laot di tengah-tengah pulau itu. Putri cantik itu pun kemudian terjun ke laut yang kemudian menjadi sebuah Pulau yang terkenal dengan sebutan Pulau Rubiah, dan lokasi yang menjadi tempat pembuangan perhiasannya menjadi taman laut yang memiliki terumbu karang yang indah berwarna-warni.

2. *Drien Teungku*

Alkisah di zaman dahulu seorang ulama dari Aceh daratan bernama Teungku

Ibrahim mengirim durian ke Sabang tepatnya Desa Iboih. Seperti lazimnya dilakukan masyarakat kebanyakan, setelah daging buah durian dimakan, berikut bijinya pun dapat dimakan setelah direbus terlebih dahulu. Namun sebagian biji tersebut tersisa dan dibuang. Ternyata biji durian tadi tumbuh menjadi pohon durian yang menghasilkan buah yang banyak dan lezat.

Konon pohon tersebut dipercaya memiliki kekuatan. Oleh Teungku di Iboih dipesankan agar pohon Durian tersebut tidak boleh menjadi masalah kelak di kemudian hari. Oleh karena itu Teungku tersebut menyampaikan bahwa pohon durian itu adalah milik seluruh masyarakat Sabang. Siapa saja boleh datang untuk menunggu durian jatuh. Jadi masyarakat pun datang bergantian menunggu durian itu jatuh ketika musim durian berbuah.

Pada suatu hari, tersebutlah seorang pemuda datang menunggu durian jatuh. Dengan sabar ia menunggu hingga terkumpul beberapa buah durian. Setelah dianggap cukup ia pun pulang dengan membawa seluruh durian tadi. Di tengah perjalanan, seseorang lewat dan mencium harumnya buah durian sehingga ia ingin sekali mencicipinya. Kemudian ia meminta kepada si pemuda untuk membagi satu durian untuknya. Tetapi si pemuda tidak memperdulikannya, ia terus bergegas pulang. Selanjutnya kembali ia berpapasan dengan orang lain yang sedang berjalan ke lading. Karena harumnya orang tersebut juga meminta tapi ia tidak mau berbagi. Begitu seterusnya setiap bertemu orang-orang di perjalanan, ia acuh.

Sesampai di rumah ia pun menikmati durian satu persatu. Satu, dua, tiga durian pun habis ia makan seorang diri. Setelah puas, barulah ia tergeletak kekenyangan. Namun beberapa saat kemudian ia merasakan perutnya penuh

dan panas sekali, hingga ia tidak sanggup menahannya. Akhirnya tanpa sadar kemudian ia mulai membelah perutnya sendiri dan mengeluarkan semua durian yang telah ia makan tadi. Sehingga seluruh bagian perutnya terburai keluar dan akhirnya ia pun mati karena ketamakannya.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa masyarakat Sampai sekarang percaya bahwa pantang bagi pencari durian teungku ini ketika seseorang yang membawa pulang durian, dalam perjalanan ada orang lain memintanya sebagian, maka tidak boleh durian itu tidak dibagikan. Ia haruslah mau berbagi. Oleh karena itu, biasanya orang akan makan dulu secukupnya di kebun durian baru kemudian dibawa pulang.

3. *Putroe Haloh*

Ada pula cerita yang berkembang di Sabang tentang sebuah objek wisata Air terjun Pria Laot. Disebutkan bahwa Air terjun tersebut merupakan tempat di mana seorang putri bernama Putroe Haloh turun dari Kayangan. Di sanalah ia biasa mandi dan bermain. Konon kabarnya tempat tersebut juga dihuni oleh makhluk halus yang terus menjaga hutan disekitarnya agar tetap indah. Beberapa orang pernah mengalami kehilangan barang ditempat itu, dicari tidak akan pernah ditemukan. Tapi barang itu akan kembali ke si pemilik dengan sendirinya dengan cara yang tidak masuk akal. *Wallahualam bissawab...*

Selain cerita-cerita di atas, tentu masih banyak cerita lainnya yang berkembang dan dipercaya oleh masyarakat setempat, di antaranya adalah:

- *Uleue Sikan*, Ular naga yang merupakan jelmaan seorang putra raja yang bagian tubuhnya dipotong sehingga setengah tubuh hingga ekornya terlihat seperti bayangan. Konon katanya sampai sekarang ular tersebut masih muncul terutama ketika gerimis atau pelangi terbentang.

- *Kuda Meuh*, seekor kuda emas jelmaan seorang putra raja yang tak lain adalah saudara *Uleue Sikan*. Tidak ada cerita lengkap tentang cerita ini. Namun kabarnya di masa penjajahan Jepang, karena tergiur dan ingin membuktikan adanya kuda yang terbuat dari emas di dasar danau, pada era 1940-an mereka berencana menguras air danau dengan mengerahkan ratusan pekerja paksa. Mereka dipaksa menggali parit antara danau ke laut lepas. Tujuannya, air danau mengalir ke laut dan membuat danau itu kering. Upaya tersebut gagal setelah terjadi bencana yang menewaskan seluruh pekerja dan tentara Jepang di sana. Kejadian tersebut diabadikan sebagai nama desa dekat danau. Yakni, Lingkungan Kuda Meuh, Kelurahan Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.

- *Lhueng China*, Cerita tentang sebuah parit yang kerjakan oleh para buruh China. Konon kabarnya parit tersebut dihuni oleh seekor ular naga. Sebagian orang percaya bahwa naga itu adalah naga betina, namun sebagian lainnya menyebutkan bahwa itu adalah naga jantan. Akan tetapi, yang jelas naga tersebut ada untuk menjaga Sabang agar senantiasa terhindar dari bencana. Namun cerita lengkap dari kisah naga di parit ini belum diperoleh secara lengkap.

Sumber:

Tulisan ini merupakan hasil wawancara dan diskusi bersama tokoh budaya selama mengikuti perjalanan pada kegiatan *Jelajah Budaya 2010* yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh.

Strategi Keharmonisan Hidup Dalam Perspektif Budaya Aceh

Oleh : Sudirman

Pendahuluan

Selama ini dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat diamati, di antaranya adalah krisis moral, ketidakpuasan, dan ketidakpercayaan masyarakat yang sejak reformasi gejalanya justru semakin meluas. Hal ini ditambah dengan globalisasi yang membuka hampir setiap ruang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena ini terus merambah ke berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, sudah saatnya bangsa ini kembali kepada kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia menjadi modal yang kuat bagi pengembangan kekuatan jati diri dan pembangunan karakter masyarakat dalam berbangsa.

Salah satu suku bangsa yang memiliki kearifan budaya yang kuat adalah Aceh. Masyarakat Aceh memiliki kesadaran sejarah dan budaya yang tinggi. Mereka cenderung mengingat dan membanggakan masa lalu yang pernah gemilang, makmur, sejahtera, dan maju, meskipun dibumbui oleh pengalaman-pengalaman pahit. Semua itu telah melahirkan tonggak-tonggak sejarah yang bermakna besar bagi mereka dan bahkan bagi bangsa Indonesia pada umumnya.

Tonggak sejarah dan pemahaman yang berharga bagi masyarakat Aceh adalah pengetahuan dan nilai-nilai yang bertumbuh-kembang setelah masuknya ajaran Islam. Melalui proses enkulturasi, semua itu terinternalisasi ke dalam diri mereka yang kemudian mengalir ke dalam berbagai aspek kehidupannya.

Nilai-nilai agama yang menyatu dengan adat merupakan faktor perekat

masyarakat Aceh, terutama pada masa lalu. Ajaran Islam yang telah menyatu dalam adat tidak hanya ada dalam wacana, melainkan juga menjadi kesadaran dan aplikasi moral seluruh masyarakat. Oleh karena itu, nilai sosial budaya masyarakat Aceh secara filosofis cenderung terbuka karena bermakna demokratis, egaliter, dan apresiatif. Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya merupakan nilai-nilai universal ajaran Islam.

Ajaran Islam dengan makna dan simbolnya telah tertanam, baik dalam pola sikap maupun pola pikir masyarakat Aceh. Setiap perilaku anggota masyarakat selalu mengacu pada norma dan patokan yang terdapat dalam ajaran Islam. Adat Aceh tidak lain adalah norma Islam yang telah mentradisi dan membudaya. Bentuk kongkrit pembudayaan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya terlaksana dalam bidang sosial dan ekonomi, melainkan juga dalam bidang hukum. Oleh karena itu, dalam artikel ini dijelaskan beberapa strategi agar terciptanya keharmonisan hidup dalam masyarakat Aceh.

1. Kerjasama Ulama-Umara

Khasanah lama masyarakat Aceh menampilkan agama dan adat sebagai dua unsur yang dominan dalam mengendalikan gerak hidupnya. Sultan dan *uleebalang* merupakan dua pilar utama pendukung kehidupan adat. Sultan dan *uleebalang* menjadi simbol keberadaan dan peranan adat dalam masyarakat Aceh. Di pihak lain, dalam lapisan yang sama, ulama muncul sebagai pilar utama pendukung serta memperjuangkan keberadaan dan peranan agama.

Ketiga pilar itu (sultan, *uleebalang*, dan ulama) saling berkaitan atau saling mempengaruhi. Dalam menjalankan kekuasaannya, sultan memerlukan kedua pilar lainnya (*uleebalang* dan ulama) sebagai penghubung antara dirinya yang bermukim di puncak struktur dengan rakyat biasa yang berada di struktur bawah. Di pihak lain, *uleebalang* dan ulama memerlukan sultan untuk melindungi diri dan kepentingan mereka.

Orientasi budaya ke masa lalu tersebut tampak masih sangat kuat pada masyarakat Aceh. Hal ini terbaca dalam sumber-sumber referensi sampai pada terbitan masa-masa yang lebih akhir. Sebagai contoh, kitab *Tazkirat al-Rakidin* (1307H/1889M) karya Syaikh Muhammad Ibnu Abbas Alias Teungku Chik Kutakarang, sering dijadikan sebagai rujukan dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Di antara ajaran yang diungkapkan dalam kitab tersebut, sebagai berikut. *Pertama*, dalam alam ini terdapat tiga macam raja, yaitu raja yang memegang jabatan lahir saja (yang memerintah rakyat menurut hukum adat), raja yang memerintah jalan agama, dan Rasul serta Anbiya. *Kedua*, kita wajib mengikuti perintah raja yang memerintah menurut hukum adat, jika perintahnya sesuai dengan hukum syarak. *Ketiga*, kita wajib mengikuti suruhan ahlu-syariah, jika tidak maka kita akan ditimpa malapetaka. *Keempat*, hukum adat dan hukum agama adalah sama kembar; tatkala mufakat hukum adat dengan hukum syarak, negeri tenang tiada huru-hara.¹

Betapa eratnya kerjasama antara elite adat dengan elite agama yang digambarkan dalam kitab tersebut. Oleh karena itu, setiap sultan yang memerintah

di Aceh selalu didampingi oleh seorang ulama. Adanya perpaduan antara ulama dan umara dalam masyarakat Aceh pada waktu itu, yang diistilahkan antara *hukom* dan *adat* sudah menyatu dan tidak dapat dipisahkan, merupakan salah satu sebab mengapa perang Belanda di Aceh dapat berlangsung begitu lama.

Demikian pula dalam hubungan kemitraan antara elite adat dan elite agama dalam mengelola unit territorial yang terkecil di Aceh yang disebut *gampung*. *Teungku meunasah* (elite agama) adalah pejabat yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keagamaan dalam suatu kampung. Adapun *geuchik* adalah pejabat yang mewakili adat. Selain itu, dalam setiap permufakatan juga diundang orang tua serta orang terpandang lainnya yang dianggap dapat mewakili pendapat segenap penduduk kampung. Segala sesuatu mengenai kepentingan umum di kampung senantiasa diurus bersama antara *geuchik* dan *teungku meunasah* dan itu sebagai perlambang keharmonisan antara adat dengan syarak.²

2. Menjaga Etika

Faktor selanjutnya yang dapat menjaga keharmonisan hidup adalah etika, yaitu bagaimana seseorang terhadap orang lain, suatu aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Kriteria etika dapat dirasakan pentingnya dalam menilai budi pekerti seseorang sehingga orang tersebut dapat dikatakan baik. Etika juga dijadikan suatu standar bagi masyarakat Aceh dalam menentukan orang yang dapat menjadi pemimpin bagi mereka. Hal itu sebagaimana diungkapkan dalam *hadih maja*, sebagai berikut. *Tayue jak di keue jitoth geuntot, tayue jak di likot jisipak tumet, tayue jak di teungoh jimeusingkee, pane patot jeuet ke pangulee*³ ('kita suruh

¹Teuku Ibrahim Alfian, "Budaya Aceh dalam Perspektif Sejarah". Dalam Darni M. Daud. *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah, dan Globalisasi*. (Banda Aceh: Unsyiah Press, 2005).Hlm. 159.

²Nazaruddin, Sjamsuddin. 1999. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam di Aceh*. (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti). Hlm. 1.

³*Ibid.* Hlm. 21.

di depan dia kentut, kita suruh di belakang dia nendang tumit, kita suruh di tengah di menyikut, mana patut jadi pemimpin”).

Budaya memotong pembicaraan atau pendapat orang lain dan sikap ingin menang sendiri merupakan cerminan orang yang tidak beretika sehingga justru dapat menurunkan harga diri di hadapan masyarakatnya. Begitu juga menyipak tumit orang yang di depan dan menyikut orang yang di samping adalah perbuatan yang curang dan jahat dalam pandangan budaya Aceh. Hal itu dianggap bertentangan dengan nilai etika dan kesopanan. Dengan demikian, menurut adat Aceh, orang seperti itu tidak sopan dan beretika sehingga tidak layak dijadikan sebagai pemimpin.

Demikian pula etika dan adab dalam bertetangga, seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat mengganggu dan menyakiti tetangga. Dalam budaya Aceh, kedudukan tetangga begitu dihormati, bahkan masuk surga pun dikaitkan dengan keharusan seseorang berbuat baik dengan tetangga.

Menjaga etika merupakan tugas besar yang semestinya diemban oleh semua pihak. Keseluruhan budi dan kesopanan, tingkah laku, merupakan cerminan budaya suatu bangsa. Implimentasi etika bukan hanya pada tataran teoretis, melainkan juga kemampuan dalam merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Menjaga Rasa Persatuan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian, tetapi saling memerlukan bantuan orang lain dan itu merupakan ciri khas pelaku budaya. Melalui keterikatan satu sama lain itulah mereka bahu membahu dan tanggung-menanggung dalam menjalani hidup di masyarakat.

Hidup dengan rasa saling membutuhkan dalam masyarakat dan saling peduli dapat menimbulkan ikatan

yang erat antara sesama individu. Hal itu seperti yang terdapat dalam ungkapan orang Aceh yang menyatakan dirinya sebagai *geutanyoe sabe-sabe syedara* ('kita sama-sama bersaudara').⁴ Ungkapan itu menjadi modal utama bagi masyarakat Aceh agar terciptanya persatuan dalam bermasyarakat.

Dalam budaya Aceh, bersaudara berarti memiliki kedekatan emosional yang diwujudkan melalui pola hidup tolong menolong dan toleransi. Dengan adanya saling toleransi dan kasih sayang sehingga dapat terwujudnya persaudaraan tersebut. Sikap toleransi dan kasih sayang dapat terciptanya suatu kesepakatan dalam mencapai suatu tujuan dan terhindarkan dari perselisihan yang dapat menuju pada perpecahan. Hal yang demikian seperti diungkapkan dalam *hadih maja*, yaitu *teuga deungon le, beuhe deungon mufakat* ('kita kuat kalau banyak/bersama, kita berani kalau mufakat').⁵ Demikian juga *hadih maja* yang menyebutkan *kalo mufakat lampoh jirat tapeugala* ('kalau sudah sepakat perkuburan dapat digadaikan').

Tujuan akhir yang diharapkan dari persaudaraan tersebut adalah kedamaian. Kedamaian adalah dambaan setiap masyarakat karena dengan suasana damai dan tentram, segala sisi kehidupan dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Roda perekonomian berjalan dengan lancar, orang dapat bekerja dengan baik dan belajar dengan tenang hingga kemakmuran dapat dicapai.

Kedamaian juga berarti terciptanya suatu suasana yang masing-masing orang menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, dalam tatanan kehidupan

⁴ Darni M. Daud. *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah, dan Globalisasi*. (Banda Aceh: Unsyiah Press, 2005). Hlm. 18.

⁵ Darwis A. Soelaiman (ed.). *Warisan Budaya Melayu Aceh*. (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu-Aceh, 2003). Hlm. 33.

masyarakat Aceh ada suatu ungkapan yang menyebutkan, yaitu *han teupeh bak tajak, han teupeh bak tawoe, sabee keu droe-droe tamita bahagia* ('tidak menyinggung ketika kita pergi, tidak menyinggung ketika kita pulang, sesama saudara kita mencari bahagia').⁶ *Hadih maja* tersebut bermakna bahwa tidak dibenarkan mengusik milik orang lain yang bukan miliknya. Bagaimana jadinya jika seseorang berjalan atau duduk bukan pada posisi yang sebenarnya sehingga tapak kaki menginjak hak orang lain. Dengan demikian, dapat menimbulkan kemarahan dan perselisihan.

4. Menjaga Hak dan Kewajiban

Sebagaimana diungkapkan dalam *hadih maja*, yaitu *umong meuateueng, lampoh meupageu*.⁷ *Hadih maja* tersebut bermakna bahwa dalam menjalankan hidup, ia harus berhati-hati karena ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, serta harga diri sehingga hak dan kewajiban, serta harga diri seseorang menjadi batas dari kebebasan orang lain.

Begitu juga ketika seseorang memahami bahwa sesuatu yang patut atau tidak, dia akan memilih orang atau benda yang dapat dipergunakan dengan tepat, seperti *sipatu tasok bak gaki, kupiah tapueduek bak ulee* ('sepatu dipakai di kaki, topi dipakai di kepala'), bukan sebaliknya. Demikian juga *hadih maja* yang menyebutkan *tajak be lot tapak, taduek be lot punggong* ('berjalan semuat tapak kaki, duduk semuat punggong').

Ketiga *hadih maja* di atas memberikan penjelasan bahwa budaya Aceh menghendaki setiap orang menjaga hak dan kewajiban sesamanya. Apabila sikap yang demikian dimiliki oleh setiap

orang maka akan tercipta keharmonisan dalam masyarakat.

5. Berbuat Adil

Adil merupakan sikap dan perilaku yang tidak berat sebelah dalam mempertimbangkan keputusan, tidak memihak, dan tidak menggunakan standar yang sama bagi semua pihak. Rasa adil merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari nilai adat, agama, dan budaya. Keadilan merupakan tuntutan setiap orang. Keadilan juga merupakan landasan untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, keadilan menjadi tema sentral setiap perubahan sosial.

Sebagai masyarakat muslim, orang Aceh selalu mengaitkan keadilan dengan ajaran Islam yang mereka yakini. Menurut ajaran Islam, keadilan atau bersikap dan berbuat adil, sejauhmana seseorang mampu menerapkan semua nilai dan norma-norma yang ada dalam ajaran wahyu atau konsistensi seseorang dengan nilai wahyu dalam kehidupannya sehari-hari. Wahyu merupakan sumber kebenaran yang mutlak, keadilan yang diartikan di dalamnya merupakan keadilan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, konsep keadilan yang dijalankan oleh sultan Aceh tersebut tidak terlepas dari pengaruh nilai agama yang menganjurkan manusia berbuat adil. Untuk itu, muncul ungkapan dalam masyarakat Aceh, *raja ade raja disembah, raja lalem raja disanggah* ('raja adil raja disembah, raja zalim raja dibantah').⁸

Dalam perkembangan masyarakat, keadilan memang bukan tujuan akhir, tetapi keadilan menjamin bahwa tujuan akan lebih mudah dicapai. Tujuan akhir yang hanya dapat dicapai melalui keadilan tersebut adalah kesejahteraan rakyat. Tanpa keadilan, kesejahteraan hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Untuk itu, para sultan yang memerintah di Aceh

⁶ Daud, *op.cit.* Hlm. 27.

⁷ Hasjim MK. *Himponan Hadih Madja*. (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, 1989). Hlm. 135.

⁸ Daud. *Op.Cit.* Hlm. 346.

memahatkan kata *adil* pada mata uang yang dikeluarkannya sebagai “peringat” bagi setiap orang harus selalu berbuat adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Apalagi seorang raja terhadap rakyat yang dipimpinnya.⁹

Sultan yang memerintah di Aceh menyadari bahwa jabatan adalah amanah yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan umat, di antaranya melalui perilaku adil. Para sultan yang memerintah di Aceh pada masa lalu begitu peka terhadap keadilan tersebut, jangan sampai karena ketidakadilan, orang saling membunuh dan perampasan hak orang lain secara tidak sah. Hal itu seperti yang dicontohkan oleh Sultan Iskandar Muda yang telah menghukum anaknya sendiri karena dianggap telah berbuat kesalahan.

Penutup

Budaya senantiasa tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Adat istiadat suatu tempat merupakan norma-norma yang telah berlaku sepanjang masa dan telah diwariskan secara turun-temurun sehingga merupakan sesuatu yang harus dipatuhi dalam menyelenggarakan kepentingan bersama.

⁹T. Ibrahim Alfian. “Samudra Pasai: Bandar Dagang dan Pusat Budaya”. *Makalah Seminar Sejarah Nasional V*. Semarang, 1990. Hlm. 14.

Dalam rangka membenahi kembali kondisi masyarakatnya menjadi rukun, seimbang, aman dan damai salah satu pilarnya adalah membangun kembali tatanan dan pranata budaya masyarakat yang berakar pada adat dan adat istiadat. Adat dan adat istiadat merupakan elemen dan aspiratif dasar bagi pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, setiap sisi kehidupan masyarakat harus dilandaskan pada kesadaran kebudayaan. Untuk itu, kesadaran kebudayaan harus terus ditumbuhkan, digali, dan dikembangkan.

Pembinaan budaya memerlukan dukungan dan peran serta secara aktif segenap anggota masyarakat. Untuk menggerakkan peranan serta segenap anggota masyarakat dalam membina dan memperkembangkan kebudayaan perlu dibangkitkan kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan sosial yang terwujud melalui proses sejarah. Kesadaran sejarah sebagai satu bangsa itulah yang perlu dibina dan disebarluaskan kepada segenap anggota masyarakat guna memperkokoh persatuan. Kesadaran berbudaya juga penting artinya karena bukan hanya mempersoalkan asal usul yang memperkuat perasaan yang dapat mempertajam pandangan ke dalam dan ke luar kesatuan sosialnya, melainkan juga penting untuk memperkuat dorongan mencapai cita-cita bersama di masa kini dan akan datang setelah belajar dari pengalaman masa lampau.

Sudirman, S.S., M.Hum. adalah Peneliti Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya

Banda Aceh

Melestarikan Harmoni Dalam Bingkai NKRI: Melerai Pro-Kontra Bendera dan Lambang Daerah

Oleh : Hasbullah

Pendahuluan

Dalam pandangan ilmu sosial, ada dua pendekatan yang saling bertentangan untuk memandang masyarakat. Kedua pendekatan ini meliputi pendekatan struktural-fungsional (konsensus), dan pendekatan struktural-konflik. Pendekatan konsensus berasumsi bahwa masyarakat mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi, tetapi saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Sedangkan pendekatan konflik berasumsi bahwa masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan.

Di Indonesia istilah konflik dalam kajian politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, separatis, teroris, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian "benturan", seperti pro-kontra, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.¹ Masing-masing pihak berupaya keras untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber yang sama. Namun untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber yang sama itu, kekerasan bukanlah satu-satunya cara. Kekerasan digunakan sebagai alternatif terakhir.

Konflik dalam masyarakat dibagi dalam dua kategori, yaitu; konflik yang berwujud kekerasan, dan konflik yang

tidak berwujud kekerasan.² Menurut Paul Conn, situasi konflik dibedakan menjadi konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*), dan konflik menang-menang (*non zero sum conflict*).³ Konflik menang-kalah di mana situasi konflik bersifat antagonistik, sehingga tidak mungkin dicapai kompromi di antara pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan konflik menang-menang adalah situasi konflik di mana pihak-pihak yang terlibat konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan musyawarah sehingga semua pihak mendapatkan tuntutan dari konflik tersebut.⁴

Benedict Anderson menyebutkan masyarakat Indonesia adalah "*imagined community*", atau pandangan yang meyakini negara-bangsa (*nation state*) "hanya" sebagai suatu komunitas besar yang "dibayangkan" di dalam suatu ikatan keluarga. Seharusnya masyarakat di seluruh Indonesia, benar-benar merasa sebagai bagian dari ikatan keluarga besar yang bernama Indonesia.⁵

Perjuangan menuju harmoni di Indonesia sebagai kebaikan bersama dalam kehidupan bernegara-bangsa masih menjadi visi dan misi dari seluruh rakyat yang mengerti arti perjuangan menggapai "keadilan sosial" dalam bingkai NKRI, seperti yang dicita-citakan "*founding father*" di masa lalu. Tujuan ke arah itu tentunya memerlukan pengorbanan dan perjuangan yang tidak sedikit dari

²Ibid.

³Ibid

⁴Ibid

¹Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia), 1992, 149.

⁵Benedict Anderson dalam Hermawan Sulistyono, *Indonesia: Negara Bangsa?, Pikiran Merdeka*, tanggal 23 Agustus 2012.

masyarakat Indonesia. Kendali utama dalam perjalanan ke arah itu sangat tergantung dari individu-individu masyarakat, sedangkan lingkungan hanya bertindak sebagai elemen penunjang dalam *khazanah* bernegara-bangsa yang “ideal”.

Indonesia sebagai “negara-bangsa” berdaulat sudah melebihi usia setengah abad, atau sejak diproklamkan 68 tahun yang lalu. Namun, dinamika permasalahan masih terus terjadi sampai saat ini. Sebagai ilustrasi adalah merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme di level atas kehidupan bernegara bangsa seperti di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, pergumulan antar “penyelenggara negara”, “alat negara”, bahkan hingga di level bawah di masyarakat. Di level masyarakat, antarkelompok, antaretnis, antardesa, sering terjadi saling serang, saling bunuh, dan berbagai tindakan anarkisme lainnya, baik menyangkut “pelanggaran adat” antarmasyarakat maupun pergesekan akibat tapal batas ulayat dan Pilkada. Belum lagi permasalahan sosial lainnya, seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, kemiskinan, dan penggusuran.

Masyarakat Indonesia dan seluruh elemen negara-bangsa harus mampu secara individu memaknai dinamika yang menjadi tanggung bersama di dalam memperkuat “integrasi negara-bangsa”. Dengan memahami dan memaknai “integrasi negara-bangsa”, setidaknya mampu memberi rasa aman kepada individu masyarakat maupun lingkungan negara-bangsa. Selain itu, “pemikiran jernih” harus dikedepankan agar akar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara-cara bermartabat sebagai komunitas di dalam sebuah negara-bangsa yang memiliki ideologi komprehensif, yaitu; ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan rasa keadilan. Hanya aplikasinya saja saat ini belum dijalankan secara optimal oleh seluruh

elemen negara-bangsa sesuai kapasitas dan porsinya masing-masing.

Masyarakat Indonesia yang mengerti dan memahami akar permasalahan negara-bangsa tersebut, tentunya akan mencari solusi terbaik melalui musyawarah sebagai pengaplikasian dari visi dan misi kebaikan bersama menuju kehidupan harmoni di dalam bingkai NKRI sebagai konsep “bernegara bangsa Indonesia”. Namun, kiprah itu harus mampu dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat yang memahami makna “*Bhienneka Tunggal Ika*” atau “*berbeda-beda, tetapi satu jua*” dalam bingkai “persatuan Indonesia”. Harmonisasi di kehidupan bernegara-bangsa ini sangat tergantung oleh sikap dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin pemerintah dan pemimpin masyarakat yang tentunya berpengaruh kepada seluruh anggota masyarakat sebagai bagian elemen terpenting dalam negara-bangsa.

Sejarah Konflik, Kebaikan Bersama, dan Harmonisasi di Aceh

Kerajaan Aceh Darussalam sejak dahulu (paling tidak sejak tahun 1514-1904), sudah memiliki *local wisdom* seperti “budaya damai” yang dirumuskan “*duek pakat*”, dan berbagai istilah lainnya. Hal ini dipresentasikan di dalam ungkapan tradisional *hadih maja, panton, nalam*, dan lain-lain. Budaya damai tersebut, sebenarnya sudah menjadi sistem sosial dalam adat-istiadat di Aceh. Namun, budaya damai dan harmoni mulai pudar dan nyaris menghilang ketika terjadi invasi asing yang menerapkan politik *divide et impera* dalam konflik Aceh, ketika membenturkan kepentingan antara ulama (Teungku) dan *umara* (dulu “*Teuku*”, sekarang “*Teungku*”) yang berimbas ke level bawah. Ketika konflik terus saja terjadi, budaya damai itu sudah begitu asing, mahal, dan tidak mendapat perhatian

yang maksimal sehingga semakin sulit mengaplikasikan kembali saat ini, akibatnya muncul cerminan dari ungkapan lokal sebagai bentuk kemarjinalan dari kebaikan bersama, "*meukon ie leuhob; meukon droe gob*", artinya "kalau bukan air, lumpur; kalau bukan diri kita, orang lain". Hal ini terjadi karena masyarakat Aceh sudah begitu lama bergumul di dalam pusaran konflik, sehingga pengarah dan penyosialisasikan tentang "budaya damai" di dalam konteks bernegara-bangsa harus masih dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat.

Sejarah konflik yang pernah terjadi di Aceh bukan hanya pada tataran horizontal antara pemimpin pemerintah dengan pemimpin keagamaan dalam masyarakat saja seperti halnya antara *uleebalang* vs *ulama* ketika Perang Cumbok pada paruh akhir tahun 1945. Namun konflik juga terjadi secara vertikal dengan pemerintah pusat yang berawal dari peleburan provinsi Aceh ke Sumatera Utara pada tahun 1949. Konflik itu terus bersambung ketika proklamasi DI/TII Aceh pada tahun 1953-1962 oleh Teungku Daud Beureueh dan berlanjut dengan proklamasi GAM pada tahun 1976 oleh Teungku Hasan Tiro. Konflik Aceh berlarut-larut hingga terjadi *MoU* perdamaian di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005, antara pemerintah RI dengan kelompok separatis GAM. Momentum perdamaian antara pusat dan daerah (RI dan GAM) itu "*sunnatullah*" terjadi, yaitu setelah terjadinya peristiwa gempa bumi 8,9 SR yang disusul tsunami dahsyat pada tanggal 26 Desember 2004.

Saat itu mulai tumbuh kembali benih-benih harmonisasi dan kedamaian bagi seluruh elemen di negeri yang dijuluki "*Seuramoe Meukah*" ini. Meskipun konflik sudah berlalu, dan konsensus perdamaian demi kebaikan bersama sudah dilakukan dalam rentang waktu sebelum itu, tetapi *MoU* ini dinilai mampu memberikan secercah harapan bagi perdamaian abadi

demi harmonisasi kehidupan dalam masyarakat Aceh selamanya.⁶

Tinjauan Historis Lahirnya "Bendera dan Lambang Aceh" Secara "De Jure"

Sebagai realisasi perdamaian demi kebaikan bersama, maka dilakukan *MoU* antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis GAM di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Setahun setelah itu, dilakukan pengesahan Undang-Undang tentang Pemerintah Aceh (UUPA) pada tanggal 11 Juli 2006. Disebutkan UUPA yang akan mengatur, pelaksanaan kewenangan di semua sektor publik yang diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan.⁷ *MoU* yang direpresentasikan dalam UUPA sudah memuat hampir semua aspek kehidupan masyarakat Aceh, tetapi tidak semua memahami dan mengetahuinya secara komprehensif. Akibatnya terjadi berbagai "interpretasi" dalam masyarakat Aceh terhadap isi UUPA. Seperti penafsiran pada Bab 36 tentang bendera, yang menyebutkan; lambang dan *hymne*, khususnya Pasal 246, bagian 2 menyatakan bahwa; "Selain bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. Namun pada Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa; "Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan

⁶Pada masa Belanda dan Hindia Belanda konflik dengan pemerintah pusat melahirkan pertentangan, yaitu antara "*pejuang muslimin*" versus "*kaphe*", sedangkan pada masa RI, melahirkan konflik pertentangan antara GAM versus *Pai* (TNI/Polri/dan yang dianggap antek-anteknya), efeknya budaya damai dan harmoni dalam kehidupan masyarakat Aceh menjadi tercerabut dari akarnya.

⁷Misri A.Muchsini, *Damai dalam Realitas Historis Aceh*, dalam Yusni Sabi, dkk, *Pergulatan Panjang Budaya Damai dalam Masyarakat Multikultur*, (Banda Aceh: Yayasan Pena dan IAIN Ar Ranirry Press), 2007, hlm.220.

merupakan simbol kedaulatan, dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.

Pada bagian lain di ayat (4) disebutkan; “ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur dalam qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pada pasal 247 UUPA, ayat (1) menyebutkan; “Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagaimana simbol keistimewaan dan kekhususan”. Pada ayat (2) disebutkan; “ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun Aceh.

Setahun kemudian, keluar Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Pada Bab I tentang Ketentuan Umum, disebutkan pada pasal 1, yaitu: 1) Bendera Negara adalah Sang Merah Putih, 2). Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, 3). Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya. Sedangkan lambang daerah adalah panji kebesaran, dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Mengenai kedudukan dan fungsi lambang dan bendera daerah, seperti yang disebutkan Bab III Pasal 3, bahwa : 1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah, 2) Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 4 menyebutkan lambang daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

Khusus mengenai desain bendera dan lambang daerah, disebutkan sebagai berikut; dalam Pasal 6, bagian 1) Desain

bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah, 2) Desain logo daerah disesuaikan dengan isi logo yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan tersebut, 3) Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau negara lain, 4) Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Pro-Kontra “Lambang dan Bendera Daerah” di Provinsi Aceh

Kondisi obyektif di provinsi Aceh saat ini adalah adanya pro dan kontra di seputar permasalahan identitas lokal, khususnya mengenai bendera dan lambang daerah Aceh. Latar belakang pro-kontra tersebut sebenarnya hanyalah ketidaksepahaman “interpretasi” terhadap bendera dan lambang yang disahkan oleh Pemerintah Aceh melalui Qanun Nomor 3 tahun 2013, pada tanggal 25 Maret 2013.¹⁰ Dasar Pemerintahan Aceh dalam pengesahan bendera dan lambang lokal tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Berkaitan dengan bendera dan lambang daerah, dalam UUPA Pasal 246 tentang Bendera, Lambang dan *Hymne*, disebutkan bahwa Pemerintah Aceh

⁸Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang Daerah

⁹*Ibid*

¹⁰Serambi Indonesia, *Bendera Aceh Resmi Berkibar*, tanggal 26 Maret 2013.

diperkenankan menggunakan bendera, lambang, dan *hymne* sebagai cerminan keistimewaan dan kekhususan, tetapi bukan bendera dan lambang sebagai suatu kedaulatan Aceh.¹¹ Hal inilah memunculkan beragam interpretasi di masyarakat Aceh sehingga bisa terjadinya “disharmoni” antara pihak pro-kontra terhadap penetapan bendera dan lambang daerah tersebut. Berbagai media massa lokal dan jejaring sosial di Aceh memuat permasalahan ini. Di kabupaten, pihak yang pro melakukan pengibaran “*Bintang Buleun*”, karena sudah ditetapkan dalam lembaran daerah setelah melalui mekanisme penggodokan dan konsensus di DPRA serta Keputusan Qanun No.3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang daerah oleh pemerintah Aceh. Pihak yang pro juga larut dalam *euforia* dengan menaikkan bendera “*Buleun Bintang*” sejak pengesahan sebagai “identitas daerah” dan menganggap sudah sesuai dengan amanat UUPA tahun 2006. Berbagai aksi penaikan bendera “*Buleun Bintang*” di pantai Timur Aceh, tanggal 25 Maret 2013, dan juga di “*rumoh*” *Wali Nanggroe* di Banda Aceh.¹² Tanggal 1 dan 4 April 2013 “*Bintang Buleun*” diarak keliling Banda Aceh ketika Mendagri dan Ditjen Otsus datang ke sana untuk merundingkan permasalahan tersebut.¹³

Pihak kontra terutama di Aceh Tengah, Aceh Tenggara dan Aceh Barat menolak bendera tersebut karena dianggap tidak mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Aceh, atau hanya merepresentasikan kelompok dan etnis tertentu saja. Mereka berkonvoi di Takengon, Kutacane dan Meulaboh dengan

bendera “Merah Putih”.¹⁴ Sedangkan pihak yang kontra mengatakan, bahwa lambang dan bendera Aceh masih dalam perdebatan historis dan belum mencapai final, karena tidak merepresentasikan masyarakat Aceh yang multikultur secara komprehensif. Bahkan ada juga daerah yang justru menginginkan bendera kerajaan Aceh dulu, yaitu “*Alam Peudeung*”, dan bahkan ada yang menolak bendera “*Bintang Buleun*”. Ada juga yang mengatakan, bahwa bendera dan lambang Aceh saat ini identik dengan bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai identitas partai lokal tertentu dan identitas separatis.

Pihak kontra melakukan konvoi “Merah Putih” dan menolak “*Bintang Buleun*”, seperti yang terjadi di Meulaboh, Aceh Barat, di Takengon, Aceh Tengah, dan di Kutacane Aceh Tenggara.¹⁵ Pro-kontra ini dapat menimbulkan disharmoni dalam kehidupan masyarakat Aceh, apabila tidak segera diselesaikan dengan bijaksana oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dengan segenap elemennya.

Melestarikan Keistimewaan Kekhususan Aceh dan Harmonisasi dalam NKRI

Setahun setelah *MoU* Helsinki, pemerintah Indonesia mensahkan UUPA pada tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengakui keistimewaan dan kekhususan Aceh di Republik Indonesia. Dari keistimewaan dan kekhususan tersebut, Aceh diperbolehkan memiliki lambang dan bendera lokal sebagai identitasnya, bukan sebagai wujud kedaulatan Aceh. Namun, ada sebagian masyarakat Indonesia dan Aceh yang mengkhawatirkan, identitas Aceh seperti lambang dan bendera Aceh justru menjadi pencetus disharmoni di dalam kehidupan bernegara-bangsa di Aceh, karena dianggap telah mengakui perjuangan

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bagian XXXVI, pasal 246, hlm.42

¹²Lihat Serambi Indonesia tanggal 26-27 Maret 2013

¹³Lihat Serambi Indonesia, tanggal 1-4 April 2013

¹⁴Lihat Serambi Indonesia tanggal 2 April 2013

¹⁵ Lihat Serambi Indonesia tanggal 1 April 2013

separatisme yang pernah terjadi sejak berpuluh tahun yang lalu. Sementara kegusaran lainnya adalah keberadaan lambang dan bendera Aceh “berbenturan” dengan konsep NKRI.

Konsep lambang dan bendera lokal, memang biasanya terdapat di negara-negara yang menganut konsepsi negara federal, tetapi di Inggris yang menganut konsep “kesatuan” ternyata juga memiliki daerah dengan identitas lokal, seperti partai, bendera, dan lambang lokal yang diberlakukan di wilayah yang mempunyai status otonomi khusus, seperti Skotlandia dan Irlandia Selatan. Hal itu bisa diterapkan di Indonesia, khususnya di Aceh dalam rangka melestarikan keistimewaan dan kekhususannya.

Ranah permasalahan mengenai identitas lokal sebenarnya perbedaan interpretasi “politik hukum” oleh kelompok dan masyarakat Aceh. Padahal bendera dan lambang daerah, semata-mata bagian dari instrumen politik negara menjaga stabilitas dan agregasi kepentingan dalam menempatkan hak warga negara. Politik hukum bisa diterapkan, tanpa harus melihat apakah bentuk negara “kesatuan” ataupun “federasi”. Hal penting adalah tetap mengedepankan perdamaian dan harmonisasi kehidupan bernegara-bangsa di Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penutup

Belajar dari sejarah masa lalu, elemen pemerintah dan masyarakat Aceh harus membuka kembali *file-file* sejarah tentang konflik vertikal dan janji-janji pemerintah pusat kepada pemimpin dan masyarakat Aceh. Kemudian melakukan

langkah-langkah baru mewujudkan impian perdamaian untuk melestarikan harmoni dalam bingkai kebaikan bersama masyarakat negara-bangsa Indonesia di provinsi Aceh.

Pemerintah pusat dan daerah harus mensosialisasikan dan bertindak cermat, realistis, dan patut diambil untuk menjaga harmonisasi masyarakat dalam menanggapi pro-kontra terhadap permasalahan bendera dan lambang daerah tersebut dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa bendera dan lambang Aceh, apapun “warna dan logo” yang nantinya dipilih “secara konsensus”, demi kebaikan bersama, bukanlah lambang separatisme, juga bukan bendera dan lambang kedaulatan seperti halnya bendera “Merah Putih”, dan lambang “Burung Garuda”, tetapi hanya bendera dan lambang daerah sebagai pengakuan “keistimewaan dan kekhususan” provinsi Aceh.

Kesepahaman dan kesamaan persepsi ini penting, di tengah munculnya berbagai interpretasi “*Bintang Buleun*” dan “*Singa Buraq*”, menyangkut upaya pelestarian “budaya damai” dan harmonisasi kehidupan bernegara-bangsa di Aceh. Kebijakan ini juga mempengaruhi harmonisasi dalam kehidupan masyarakat dalam bernegara-bangsa di Aceh yang sangat multikultur dan multietnis karena kebijakan pemimpin hari ini menentukan perjalanan sejarah masyarakat Aceh bingkai NKRI di provinsi Aceh saat ini dan di masa depan. *Wallahualam.*

Hasbullah, S.S. adalah Peneliti Muda Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

Batak Melayu: Simbol Adaptasi Harmonis Dari Sumatera Timur

Oleh : Nasrul Hamdani

Pendahuluan

Tahun 1958 laporan Clark E. Cunningham bertajuk *Postwar Migration of the Toba-Bataks to East Sumatra* dirilis Pusat Kajian Asia Tenggara Universitas Yale, Amerika Serikat.¹ Laporan antropolog *University of Illinois at Urbana-Champaign* ini tidak saja membahas motivasi dan gerak perpindahan orang Batak dari dataran tinggi Toba ke pesisir Sumatera Timur tetapi memaparkan proses serta dampak sosial akibat migrasi itu.

Migrasi orang Batak ke kampung halaman orang Melayu sejak awal 1950-an itu dipandang berbeda dengan migrasi sebelumnya. Jika di masa prakolonial atau kolonial migrasi Batak berlangsung alamiah maka perpindahan sesudah Perang Dunia (PD) II menimbulkan masalah, terutama antara orang Melayu yang merupakan penduduk tuan rumah dan menganut Islam dengan para pendatang Batak yang menjadi agresif dan merupakan penganut Kristen yang taat.

Permasalahan itu kemudian dipanaskan oleh cerita stereotipik tentang 'Melayu malas' atau Batak yang 'rakus tanah'.² Pelibatan kelompok etnik lain atau

sentimen agama baru terendus belakangan terutama karena konflik perebutan tanah kian mendesak orang Melayu yang secara adat merupakan pemilik atas tanah-tanah di Sumatera Timur termasuk tanah perkebunan yang diperebutkan oleh militer, partai politik, serikat buruh, dan petani selama nasionalisasi.

Konflik yang membuat orang Melayu dan Batak dalam posisi berhadapan ini merupakan keniscayaan sejarah dan terekam dalam ingatan masyarakat Melayu di eks-karesidenan Sumatera Timur (1887-1952). Namun keniscayaan yang berawal tahun 1950-an ini menutupi hubungan antara penguasa Melayu di pesisir dengan orang Batak yang turun gunung untuk menukar hasil buminya di bandar Melayu dan beradaptasi secara damai dari masa prakolonial sampai akhir PD II.

Tulisan ini membahas Batak Melayu sebagai entitas budaya, politik dan ekonomi yang menjadi bagian menarik dalam sejarah kawasan. Oleh karena itu merekonstruksi cerita Batak Melayu; kelompok sosial yang lahir dari asimilasi dan/atau akulturasi harmonis antara dua budaya nominal³ yang (sekarang) dianggap bertolak belakang. Ulasan ini bukan sekedar cara mengetahui masa lampau tetapi memahami perkembangan identitas

¹Clark E. Cunningham, *Postwar Migration of the Toba-Bataks to East Sumatra*, (New Haven: Yale University, Southeast Asia Studies, Cultural Report Series No. 5, 1958 [1962], xii + 189 hlm).

²Mengenai mitos Melayu (pribumi) malas baca S.H. Alatas, *Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial*, Jakarta: LP3ES, 1988. Tentang Batak yang rakus tanah; *land-hunger* atau *land-hunter* silahkan rujuk Clark E. Cunningham, *Op.Cit.* dan Lance Castles, *Tapanuli 1915-1940: Kehidupan Politik*

Suatu Karesidenan di Sumatra, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001).

³Daniel Perret, *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, (Jakarta: KPG-EFEO-Puslitbang Arkenas, 2010).Hlm. 55-73. Perret menggunakan istilah budaya nominal sebagai dasar untuk membagi dan memetakan pengaruh Melayu dan Batak di Sumatera Utara.

Batak Melayu sebagai bagian dari sejarah dan sistem sosial di Indonesia.

Melayu Penguasanya, Batak Asalnya

Batak Melayu menjadi sebutan umum untuk orang-orang Batak yang menjadi kawula Melayu karena pindah dari kampung asalnya ke daerah kekuasaan para Sultan Melayu. Untuk memperoleh pengakuan sebagai kawula, hak dan jaminan dari Sultan-sultan Melayu yang berkuasa, migran Batak yang masih animis secara sukarela memeluk Islam dan mengaku orang Melayu.

Batak Melayu ini merupakan wujud kompleks dari istilah 'masuk Jawi' yang dikenal sebagai kosakata Melayu Pekan. Namun secara historis, Batak Melayu merupakan istilah yang cenderung dikenal setelah kemerdekaan dan menjadi asosiasi baru bagi kelompok Melayu *kacukan* (*mixed-blood*), konsensus sekaligus adaptasi kelompok *kacukan* dalam dinamika sosial di kawasan yang mulai didominasi orang Batak. Selain itu, istilah Batak Melayu ini merupakan pangkal rujukan tersendiri untuk merekonstruksi perubahan dan kesinambungan identitas, asal-usul, 'keaslian' serta pembentukan struktur kekuasaan Melayu prakolonial. Dalam kisah tentang kerajaan Melayu di Sumatera Timur, hampir tidak satupun cerita mengenai asal-usul raja dan kekuasaan Melayu di Sumatera Timur yang tidak bersinggungan dengan -terlepas dari pergeseran konsepsi stereotipik Batak pada masa sesudahnya- pendatang dan kelompok yang disebut Batak (sering ditulis *Batta* dalam laporan Eropa) termasuk orang-orang yang disebut sebagai *Kataran* (kemungkinan Hataran atau Simalungun masa kini) dan *Karau-karau* (Karo) yang membangun peradabannya di dataran tinggi Sumatera Timur.

Dewa Syahdan misalnya, nenek moyang para penguasa Kesultanan Negeri Langkat ini memiliki ikatan dengan empat

Raja *Urung* Karo dari periode Haru (I) sebelum ditaklukkan Pasai. Dewa Syahdan, salah seorang pembesar Haru yang selamat dari peperangan ini disebut memiliki garis keturunan *merga* Peranginangin, terutama kelompok Karo *merga* Peranginangin yang berasal dari Bahorok dan Tanjung Pura yang kemudian dijadikan ibukota Kesultanan Negeri Langkat.⁴

Demikian juga dengan Sri Paduka Gocah Pahlawan Koja Bintan, Panglima Perang Aceh asal Delhi yang jadi nenek moyang para penguasa Deli dan Serdang. Pengangkatannya sebagai penguasa Deli setelah penaklukan Haru tidak dapat dilepaskan dari pernikahannya dengan perempuan Karo bernama Nang Beluan *beru* Surbakti, anak (kadang disebut juga adik) Datuk Sunggal. Sang mertua, bersama tiga Raja *Urung* Karo lain menjadi landasan pembentukan konfederasi yang berperan penting dalam penetapan dan pengangkatan Sultan Deli hingga kini.

Kesultanan Negeri Asahan, Kualuh-Leidong, Kota Pinang, Bilah dan Panai juga demikian. Para penguasa dua negeri ini memiliki nenek moyang yang sama yaitu Batara Sinomba. Sosok yang disebutkan berasal dari Pagaruyung ini kemudian membangun kekuasaan pertama di sebuah tempat yang dinamai Pinang Awan atas sokongan Patuan Hajoran, patron *marga* Daposong (mungkin Dasopang) dan Tambak di hilir sungai Barumun di Kota Pinang masa kini. Perkawinan politik dengan perempuan tempatan merupakan alasan kuat mengapa Batara Sinomba dapat berkuasa di tempat itu hingga terbentuk Kesultanan Kota Pinang.

Cucu Batara Sinomba, Siti Ungu Puteri Berinai atau Putri Ungu Selendang Bulan adalah pangkal silsilah raja-raja Asahan. Berdasarkan cerita yang dikenang

⁴Zainal Arifin, *Subuh Kelabu di Bukit Kubu*, (Tanjung Pura: Dewan Kesenian Langkat, 2002).

kawula Asahan, Sultan Asahan I, Abdul Jalil Rahmatshah merupakan anak dari Sultan Iskandar Muda (*sic*) dengan Siti Ungu.⁵ Siti Ungu merupakan bagian dari 'tanda takluk' kerajaan Air Merah pada Aceh. Ringkasnya, Siti Ungu dinikahi Sultan Iskandar Muda, sempat menetap di Aceh untuk beberapa waktu, mengandung sebelum diceraikan atas permintaan abangnya yang menjemputnya.⁶

Setelah Abdul Jalil Rahmatshah lahir Siti Ungu menikah lagi dengan Raja Bolon, penguasa di aliran sungai Asahan di Pulau Raja yang merupakan *patron* orang *Tubba Batta* terkuat masa itu.⁷ Bandar kecil di Pulau Raja ini kemudian menjadi pusat kekuasaan awal Asahan sebelum dipindahkan ke Tanjung Balai. Yang Dipertuan Kualuh-Leidong, Tengku Muhammadsyah al-Haj yang memerintah negeri itu dari istananya di Tanjung Pasir dikenal kawulanya memiliki *marga* Dalimunte meskipun identitas asal itu tidak digunakan secara resmi.

Ikatan genealogis atau hubungan sejarah antara para penguasa awal kerajaan Melayu dengan Batak merupakan petunjuk bagaimana keaslian (*native*) dan asal-usul (*origin*) dipahami masyarakat Melayu. Melayu dan identitas kemelayuan orang Melayu diletakkan kepada pengakuan diri bukan genealogi. Oleh karena itu, hubungan antara orang Melayu dengan Batak dapat ditelaah dari dua segi yang

akan melahirkan dua pola dalam hubungan sosial dua kelompok ini, yaitu hubungan mutual dan hubungan kultural.

Jual-beli menjadi landasan utama dalam hubungan mutual antara orang (terutama penguasa) Melayu dengan Batak selain pertahanan. Hubungan ini ditandai dengan penerimaan, toleransi dan saling bergantung. Sebagai penguasa bandar-bandar sungai yang memasok hasil bumi ke Semenanjung pada awal abad ke-19, Sultan Thaf Sinar dari Serdang misalnya, telah menjalin hubungan ekonomi yang berkesinambungan dengan orang *Karau-karau Batta* yang menetap di dataran tinggi Serdang.

Berdasarkan catatan John Anderson, dari gunung orang *Karau-karau Batta* ini membawa lada, kapur barus, emas atau *benjamin* dan menukarnya di Kampung Besar Serdang yang terletak di tepi sungai Serdang. Orang *Karau-karau* kemudian menukar barang bawaan mereka dengan produk tekstil dan peralatan logam yang didatangkan dari Pulau Pinang atau Melaka.⁸ Komoditas lain dari Serdang ialah hasil hutan seperti kayu dan rotan yang mungkin dibawa turun oleh orang-orang Batak juga.

Dalam hubungan ini, hal-hal stigmatif yang melekat pada orang Batak seperti praktik kanibalisme atau pandangan belum beradab tidak jadi penghalang. 'When they come down amongst us civilized Malays, they leave off their bad practices, but take to them again on their return' begitu ucapan Sultan Thaf Sinar yang dicatat Anderson selepas pertemuan sang Sultan dengan Orang Kaya Lela, Raja Tanjung Morawa, Tuan Selambian serta dua pembesar Batak; Raja Dolok dan Hulubalang Raja Siantar mengenai hubungan sang Sultan dengan orang Batak

⁵Perkawinan antara Sultan Iskandar Muda dan Siti Ungu Puteri Berinai ini didasarkan pada kronik Asahan yang ditulis kembali oleh Tengku Ferry Bustaman, *Bunga Rampai Kesultanan Asahan*, (Medan: t.p.).Hlm.12, disebutkan armada Sultan Iskandar Muda (*sic*) singgah di muara sungai Asahan dalam perjalanan menuju Johor. Persinggahan di Asahan ini (Perang di Asahan) juga disebutkan dalam sumber Aceh, yaitu Ramli Harun (pengalihaksara), *Hikayat Sultan Aceh Iskandar Muda*, (Jakarta: Depdikbud, 1985), hlm. 12-13.

⁶Mengenai Kisah Siti Ungu ini silahkan rujuk Nasrul Hamdani, 'Pangkal Silsilah Asahan dan 'Akhir' Sejarah Asahan Sebelum Aceh: Kisah Siti Ungu Putri Berinai' dalam *Haba* No. 63/2012.

⁷Tengku Ferry Bustaman, *Op.Cit.*, hlm. 34.

⁸John Anderson *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1971). Hlm. 303-304.

ketika melawat Pantai Timur Sumatera selama Januari-Maret 1823.⁹

Deli, daerah pemasok lada utama di Pantai Timur Sumatera juga menjalin hubungan serupa untuk pertanian dan menjalankan perniagaannya. Sultan Ahmad penguasa Deli yang memerintah di Labuhan pada awal abad ke-19 dicatat menghasilkan lada dari kebunnya yang digarap oleh 200 orang Batak. Pada tahun 1822, Sultan Ahmad memanen 50 *koyan* atau 1.300 *pikul* lada dari kebunnya di Klumpang.¹⁰ Jumlah lada dari Deli dicatat Pulau Pinang bertambah setiap tahun, salah satunya berkat pasokan dari orang-orang Batak yang menanam lada di pedalaman Deli.

Batak termasuk *Batta Karau-karau* menjadi bagian penting dalam kekuatan pertahanan Deli. Jumlah prajurit Batak di Deli diperkirakan Anderson sekitar 400 orang. Para prajurit Batak ini mudah dikenali dari penampilan dan perlengkapan yang dibawanya. Seorang prajurit Batak baik biasanya mengenakan baju berwarna biru, *serawal* Aceh, ikat kepala dan sebuah tas bahu berupa selempang yang berisi jimat, besi, tembakau, sirih termasuk sangkakala yang dibuat dari tanduk, peluru, tombak, perisai, tabung bambu berisi ranjau dan keris.¹¹

Asahan dan Serdang pun demikian. Setelah kalah dalam Perang 1865, perlawanan Asahan atas Belanda dilanjutkan oleh Pak Netak, *patron* Batak yang berkuasa di Bandar Pulo dari pedalaman Asahan. Perlawanan Pak Netak ini kemudian melibatkan kepala-kepala kampung di pedalaman, antara lain Tuan Rondahaim dari Raya, Raja Himbang dan seorang *patron* di daerah hulu sungai Asahan yang dikenal dengan nama Si

Bagot.¹² Di Serdang, meskipun perlawanan tidak berlanjut, *perbapaan-perbapaan* Karo menyatakan kesetiaan kepada penguasa Serdang.

Hubungan pertahanan dengan Batak merupakan bagian dari hubungan ekonomi. Dalam perkembangan kawasan, masalah antarkerajaan sering berawal dari perebutan sumber daya ekonomi. Ketika Anderson tiba di Deli ia mendengar kabar bahwa Sultan Deli yang baru memerangi Raja Pulo Brayon dan Raja Graha karena mengutip cukai secara sepihak membawa 40 orang *Siam* dan 60 *Sepoy* untuk 'pesta makan daging manusia' dengan prajurit Bataknya.¹³ Daging manusia yang dimakan itu berasal dari bagian tubuh prajurit yang tewas dalam pertempuran yang dimenangkan Sultan Ahmad dari Deli.

Berbeda dengan hubungan ekonomi dan pertahanan, hubungan kultural antara Melayu dan Batak bersifat kompleks karena pertembungan dua budaya itu. Dari kompleksitas ini lahirlah Batak Melayu. Batak Melayu sebagai istilah dan kategori sosial merupakan *these* yang menunjukkan akulturasi dan/atau asimilasi pendatang Batak dengan sistem sosial Melayu. Secara ringkas, pendatang Batak menjadi Melayu atas pengakuan dan penerimaan para penguasa Melayu.

Hal paling penting dalam proses itu ialah pengakuan orang-orang Batak sebagai Melayu dan penerimaan para penguasa Melayu atas Batak. Pengakuan Batak sebagai Melayu berarti juga kesediaan orang Batak melepaskan kepercayaan lama lalu memeluk Islam dan secara sadar melebur dalam sistem sosial orang Melayu. Pengakuan ini kemudian

⁹*Ibid.*, hlm. 84-85.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 61.

¹¹*Ibid.*, hlm. 34-36.

¹²Tengku Ferry Bustamam, *Op.Cit.*, hlm. 44 dan 46. Hal demikian juga dikesankan Tengku H.M. Lah Husny, *Satu Kemasan Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatera Timur 1612-1950*, (Medan: BP Husny, 1975).Hlm. 67-68.

¹³Anderson, *Op.Cit.*, hlm. 79-80.

menjadi dasar konstruksi identitas seseorang atau kelompok yang menyatakan diri sebagai Melayu yaitu beragama Islam, beradat resam Melayu dan berbahasa Melayu.¹⁴

Pengakuan atau pernyataan diri sebagai Melayu itu mendorong pembentukan identitas baru mencirikan Melayu tanpa menghilangkan ciri-ciri dari identitas lama meskipun harus disesuaikan dengan keadaan dan zamannya.¹⁵ Dalam konteks inilah Melayu digolongkan *puak* yang tidak didasarkan pada genealogi. Orang yang mengaku Melayu bisa saja bernenek moyang Jawa, Bugis, Minangkabau, Mandailing, Keling bahkan Batak. Namun Melayu tetap menjadi identitas bersama yang menautkan anggota *puak* ini sebagai entitas budaya, politik dan ekonomi.

Berkat pengakuan dan penerimaan itu pula kelompok Batak Melayu ada di seluruh wilayah kesultanan Melayu Sumatera Timur. Perkawinan politik antara penguasa Melayu dengan keturunan patron Batak dan pengislaman ('masuk Melayu' dan 'masuk Jawi') menjadi dasar pembentukan identitas kelompok Batak Melayu. Namun migrasi orang Batak ke pesisir pantai yang dikuasai Sultan-sultan Melayu dari masa prakolonial itu menjadi dasar tersendiri dalam pembentukan identitas dan 'kebudayaan' Batak Melayu di masa itu.

Migrasi orang Batak didorong oleh keadaan lingkungan dan pertumbuhan penduduk di dataran tinggi di samping daya tarik bandar-bandar Melayu. Dorongan ini dikuatkan pula dengan sedikitnya jumlah penduduk Melayu, pertumbuhan penduduk dan kecenderungan

usia (angka) harapan hidup orang Melayu umumnya yang terbilang rendah serta luasnya potensi areal pertanian dataran rendah di pesisir yang belum digarap sepenuhnya oleh orang-orang Melayu.¹⁶

Oleh karena itu, bukanlah kebetulan jika generasi awal pendatang Batak ke dataran rendah yang dikuasai Sultan Asahan, Kualuh-Leidong, Bilah dan Panai menjadi petani yang secara ekstensif memanfaatkan rawa-rawa. Di wilayah Kualuh-Leidong, hamparan sawah luas yang masih dapat dilihat sampai kini telah dibuka sejak dua abad lalu oleh pendatang Batak dari Angkola dan Padang Lawas. Sebagian besar orang Melayu di daerah ini pun mengaku memiliki marga Tambunan, Harahap, Nababan, Rambe, Nasution, Rangkuti dan sejumlah marga lain.

Di Asahan, daerah persawahan telah digarap dengan baik oleh orang Batak sedangkan pemukim Cina yang memperoleh konsesi tanah mengembangkan pertanian termasuk candu sejak awal abad ke-19. Hal demikian juga berlangsung di Bilah dan Panai yang terhubung dengan pedalaman melalui sungai Barumon. Pembukaan sawah dan penerimaan orang Batak ini dapat dilihat sebagai pangkal keberadaan kampung-kampung Melayu yang dihuni orang Batak seperti Bandar Pulo, Pulau Raja, Huta Bara, Huta Padang, Buntu Pane dan Bandar Pasir Mandoge

Ikatan sejarah dan hubungan darah antara pembesar Melayu di Sumatera Timur dengan Batak membuat kedudukan Batak Melayu terasa istimewa. Di Serdang, para *Orang Besar* di Senembah dan Tanjung Muda yang memiliki otonomi atas daerah di Serdang Hulu adalah orang Melayu keturunan Karo. Meskipun Orang

¹⁴M. Muhar Omtatok, *Siapa Agaknya Melayu Itu* dalam <http://puakmelayu.blogspot.com> (29 Desember 2008) diakses pada tanggal 15 Februari 2013.

¹⁵Tengku H.M. Lah Husny, *Op.Cit.*, hlm. 18.

¹⁶Mengenai jumlah penduduk dan kecenderungan usia (angka) harapan hidup orang Melayu baca Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Tanah di Bawah Angin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1992).

Besar di Kejeruan Senembah dan Tanjung Muda menggunakan *merga* Baros, nama ini secara telah dilembagakan sebagai *trah* Melayu yang seolah-olah dibedakan dari *merga* Barus, kelompok asal *merga* ini.¹⁷ Dua kejeruan ini disebut berdiri di atas sebuah bekas kerajaan Tua Batak.

Representasi orang Batak di Deli adalah *trah* Datuk Sunggal yang didaulat sebagai pemegang (*ulon*) janji, sosok sekaligus lembaga yang menabalkan sultan pengganti sebelum jenazah sultan yang mangkat dimakamkan. Keturunan Datuk Sunggal memiliki *merga* Surbakti dari Gajah. Tiga Datuk lainnya yaitu Datuk Hamparan Perak, Datuk Sukapiring dan Kejeruan Petumbak yang masing-masing memiliki *merga* Surbakti, Sembiring dan Barus. Bagi Orang Besar Deli *merga* menjadi pengikat mereka dengan sejarahnya meskipun telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan Deli.

Hubungan kultural antara Melayu dan Batak ini berlangsung alamiah tanpa menghilangkan identitas kultural masing-masing. Batak Melayu, sekalipun mengaku Melayu tetapi tetap mempertahankan kenangan kolektif mengenai sejarah dan asal usul mereka. Hubungan ini kemudian diabadikan dalam dua bait pantun. Satu bait berasal dari daerah Melayu di Pantai Timur Sumatera Utara (Sumatera Timur), se bait lagi berasal dari daerah Melayu di Pantai Barat Sumatera Utara (Barus - Sibolga).

Bukan kapak sembarang kapak

Tapi kapak pembelah kayu

Bukan Batak Sembarang Batak

Tapi Batak sudah Melayu

¹⁷Haji Wan Umaruddin Baros, *Sejarah Simbelang Pinggel*, (Medan: t.p. 1974).

Jangan ta kapak-kapak

Kini kapak pembelah kayu

Jangan ta Batak-batak

Kini Batak ala jadi Melayu

Proses sejarah dan adaptasi menempatkan Batak Melayu sebagai entitas budaya yang melebur segala perbedaan di antara dua budaya nominal yang kini dikesankan kontras. Jika di masa lalu orang Batak secara sadar mengaku Melayu, menyatakan tunduk pada aturan Melayu lalu diakui penguasa Melayu sebagai bagian dari kawulunya maka dengan pembedaan identitas Melayu dan Batak di masa kini, anggota 'kelompok etnik' Melayu dan Batak adalah 'konstestan' politik, ekonomi dan budaya di Sumatera Utara.

Revolusi Sosial 1946 -diakui atau tidak - telah melemahkan Melayu sebagai 'orang asli' Sumatera Timur bersama Karo dan Simalungun. Namun pepatah 'Tak Melayu hilang di bumi!' menjadi kekuatan tersendiri bagi orang Melayu termasuk yang mengaku Melayu. Meskipun muncul kecenderungan revivalisme pada diri Batak Melayu dengan menggunakan marga nenek moyang di belakang namanya, Melayu tetap menjadi entitas budaya yang menautkan orang Melayu, yang mengaku Melayu atau kelompok etnik lain yang secara tradisional adalah penganut Islam.

Penutup: Melayu dan Batak Kini

Masa kini, seperti mengulang masalah 1950-an, hubungan Melayu dengan Batak ibarat air dan minyak. Revitalisasi identitas primordial yang menguat selama pelaksanaan Otonomi Daerah 1999-2012 membuat kelompok-kelompok etnik di Sumatera Utara yang sudah terbelah secara primordial terpecah pula secara politik. Potensi benturan antaretnik pun terbilang tinggi terutama bila dikaitkan dengan penentuan batas wilayah kultural yang sesungguhnya telah

dilebur oleh pengalaman sejarah; antara Sumatera Timur dan Tapanuli yang berarti pula antara (daerah) Islam dan Kristen dengan beberapa varian permasalahannya.

Proses yang mengiringi pembentukan Batak Melayu sebagai entitas sejarah dan budaya kerap diabaikan meskipun proses itu menunjukkan proses pematangan rekayasa sosial yang telah

terbukti secara empirik. Kini di tengah euforia kebangkitan identitas primordial yang secara tidak langsung diwujudkan dalam pemekaran daerah dan wacana pemekaran daerah, 'rambu' yang mengawal euforia pascasindrom mutlak diperlukan. Setidaknya untuk memastikan perkembangan sosial berjalan sebagaimana mestinya.

Nasrul Hamdani, S.S. adalah Peneliti Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh

Ketokohan Iskandar Muda Dalam Membina Keharmonisan Kerajaan Aceh Darussalam (1607-1636)

Oleh : Cut Zahrina

Pendahuluan

Hubungan sesama manusia yang serasi serta harmonis erat kaitan dengan perasaan saling terkait antara satu individu dengan individu lainnya, semua itu diwujudkan tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu dari kebutuhan hidup adalah keselarasan atau keteraturan sosial. Apabila telah tercipta keselarasan sosial antar individu, masyarakat atau kelompok dalam berinteraksi sosial maka akan mempermudah terciptanya penyesuaian diri individu dengan proses-proses sosial dalam bermasyarakat, sehingga upaya untuk penyelarasan akan mudah tercapai.

Namun sebaliknya, apabila di dalam bermasyarakat tidak terjadi keselarasan sosial, baik antar individu, masyarakat atau kelompok, maka akan terjadi kesulitan dan keburukan untuk melakukan penyesuaian diri terhadap proses sosial dalam berbagai aktifitas bermasyarakat, dalam hal ini keteraturan sosial tidak akan tercapai.¹

Berdasarkan uraian di atas maka inti dari kata harmonisasi adalah terjadinya sebuah keterpaduan dalam berbagai dimensi yang merupakan faktor pendukung untuk menuju keselarasan. Rasa keselarasan atau keharmonisan merupakan dambaan dalam kehidupan manusia karena dengan adanya keselarasan itu ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

Kata harmonisasi jika dikaitkan pada sebuah kerajaan adalah adanya keselarasan hubungan yang merupakan fondamen dasar untuk membangun sebuah kerajaan ke arah pengembangan dan kemajuan. Untuk menggapai kesuksesan dan kemegahan tersebut tentu erat kaitannya dengan perbaikan dan pembangunan berbagai dimensi yang mempengaruhi eksistensi sebuah kerajaan baik dimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga sampailah sebuah kerajaan tersebut pada puncak keemasan atau kejayaan sebagai contoh adalah Kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Namun tatkala rasa keselarasan atau keharmonisan itu sudah memudar maka saat itulah hancurnya sebuah kerajaan atau peradaban manusia pada sebuah bangsa.

Sultan Iskandar Muda

Iskandar Muda dalam penulisan ini dikategorikan sebagai seorang tokoh sultan Aceh yang telah sukses membina keharmonisan di zamannya. Kesuksesan yang ia peroleh tentu saja bukan karena usaha dia sendiri namun karena dukungan dari para pengikut dan rakyatnya. Dukungan yang besar tercipta berkat keharmonisan dan keselarasan hubungan antara mereka sehingga menghasilkan banyak pengembangan dan kemajuan di masanya.

Keharmonisan dalam ketokohan Iskandar Muda sedikit banyak juga dipengaruhi dari silsilah keturunan, ia tergolong orang yang terpendang yaitu berasal dari keturunan raja-raja Aceh

¹[http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_sosial), 1 April 2013.

sebelumnya. Ayahnya bernama Mansur sedangkan kakeknya bernama Abdul Jalil, Abdul Jalil ini merupakan salah seorang anak dari Al-Kahhar. Dari pihak ibunya yaitu Puteri Indra Bangsa, yaitu anaknya Al-Mukammal. Ibunya yaitu Indra Bangsa adalah puteri kesayangannya Al-Mukammal. Jadi, Sultan Iskandar Muda adalah keturunan tokoh besar yang sudah menjadi sultan dan membesarkan Aceh. Bagi pihak penjajah, ia adalah seorang sultan yang diperhitungkan keberanian dan keperkasaannya dan merupakan sang penakluk bagi kerajaan-kerajaan di sekitarnya karena menurutnya apabila kerajaan tersebut tidak dikuasainya maka penjajah akan menguasainya sehingga lebih baik dia yang memulai, siasat itu juga untuk menyiapkan persatuan dan kesatuan untuk mengusir kaum penjajah.²

Sultan Iskandar Muda dikenal dengan beberapa nama yaitu Darma Wangsa dan karena kegagahannya beliau juga dipanggil Perkasa Alam. Nama mudanya adalah Tun Pangkat. Setelah wilayah Aceh bertambah luas maka dia digelar Mahkota Alam. Lidah orang Aceh menyebutnya *Meukuta Alam*. Namanya tersohor dengan panggilan *Marhum Mahkota Alam*. Selain itu ada lagi nama gelarnya Sri Perkasa Alam Johan Berdaulat. Sehingga orang menyebut nama lengkapnya Perkasa Alam Maharaja Darma Wangsa Tun Pangkat. Berbagai nama dan gelar merupakan bukti kemasyhurannya, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Menurut perkiraan, beliau lahir pada tahun 1590. Beliau seorang yang tangkas, tampan dan gagah. Sejak kecil dia sudah suka belajar menggunakan senjata. Kegemaran bergaul dengan gajah membuat binatang ini jinak dan dekat dengannya sehingga dapat diperintah dengan mudah olehnya untuk melakukan sesuatu. Kesuksesan Iskandar Muda dengan pasukan gajahnya

telah terbukti dengan keberhasilannya untuk merebut kembali benteng yang telah diduduki oleh Portugis dan juga mereka berhasil menghalau pasukan Portugis keluar dari Aceh.³

Setelah mangkatnya Sultan Ali Riayat Syah pada tanggal 4 April 1607, bagi Iskandar Muda adalah saat yang tepat untuk tampil dalam usaha menaiki tahta dengan tujuan untuk menyelamatkan Kerajaan Aceh. Usaha dan gerakannya untuk naik tahta mendapat dukungan dari para pembesar kerajaan dan *Kali Malikul Adil*. Sehingga diumumkan bahwa Iskandar Muda naik tahta dan dinobatkan menjadi Sultan.⁴

Sejak Iskandar Muda naik tahta perubahan-perubahan besar yang terencana untuk kemajuan dan pengembangan kerajaan berlaku dengan cepat. Perubahan yang sangat *significant* adalah bidang ekonomi karena menurutnya kemajuan suatu negara sangat tergantung dengan kemajuan ekonominya. Sehingga dia memiliki suatu kesimpulan bahwa produk-produk dan hasil bumi dari nusantara menjadi rebutan bangsa-bangsa luar yaitu Eropa. Di samping itu dia juga menyadari bahwa letak Aceh di ujung pulau Sumatera merupakan posisi yang sangat menguntungkan bagi kerajaan Aceh sehingga karunia ini harus dimiliki dan dinikmati oleh rakyat Aceh karena semua itu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga.⁵

Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga memikirkan sisi kelemahan Kerajaan Aceh yang sedang ia jalankan. Kerajaan Aceh belum dapat menguasai Selat Malaka. Maka ia harus dapat menguasai sepenuhnya Selat Malaka yang merupakan lalu lintas perdagangan internasional yang sering disinggahi dan tempat berlabuhnya

³ *Ibid.*Hlm.229

² H. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, Jilid I*, (Medan : Harian Waspada Medan, 1985).Hlm. 228

⁴ Hasan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989).Hlm.228.

⁵ *Ibid.*Hlm 230

kapal-kapal asing yang membawa barang dagangannya, sehingga terpikir olehnya untuk menguasainya dan melakukan koordinasi sehingga nantinya akan ia rumuskan suatu kebijakan bagi kapal-kapal asing yang melewati Selat Malaka.⁶

Pada masa Iskandar Muda, seluruh pantai barat Sumatera hingga Bengkulu berada dalam kekuasaan Aceh. Termasuk juga pelabuhannya seperti Pariaman, Tiku, Salida dan Indrapura pada masing-masing pelabuhan ini ditempatkan seorang panglima Aceh. Kekuasaannya juga meluas sampai ke pesisir timur hingga Jambi. Begitu juga dengan Semenanjung Melayu yaitu Pahang, Kedah, Patani dan Perak. Kerajaan Aceh terus berkembang di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Saat itu telah berhasil menguasai kerajaan lainnya yang berada di sekitar Kerajaan Aceh Darussalam dan juga menguasai beberapa pelabuhan penting. Kesuksesan ini menjadikan Kerajaan Aceh semakin berjaya apalagi dalam bidang perdagangan.

Saat itu di Eropa, pasaran lada sedang laku di pasaran. Sehingga permintaan kiriman lada terus meningkat. Dalam situasi demikian hampir seluruh pelabuhan yang menghasilkan lada di Sumatera dan Semenanjung Melayu berada dalam koordinasi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Kondisi demikian mengakibatkan kas pemerintah bertambah besar sehingga pembangunan kerajaan dan angkatan perang dapat diselenggarakan dengan lancar serta yang paling penting adalah terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Aceh.

Politik Internasional Sultan Iskandar Muda

⁶Anthony Reid, *The Contest of North Sumatra*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969).Hlm. 22.

Kerajaan Aceh Darussalam telah mencapai puncak kegemilangan di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Tampilnya Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) menandai pengembangan baru bagi kemajuan Kerajaan Aceh, terutama dalam usaha mengantisipasi penetrasi dan campur tangan pedagang asing. Untuk penyelesaian masalah ini sultan menempuh jalan mempersulit dan memperketat perizinan bagi pedagang asing yang hendak mengadakan kontak dengan Aceh. Sultan hanya memberi kesempatan salah satu nama yang lebih menguntungkan Kerajaan Aceh yaitu antara Inggris dan Belanda. Pernah ia memperkenalkan Belanda untuk berdagang di Tiku, Pariaman dan Barus tetapi masing-masing hanya bertahan selama dua tahun saja.⁷

Menurut sumber sejarah Sultan Iskandar Muda memerintah Kerajaan Aceh hampir 30 tahun lamanya. Banyak keberhasilan yang telah beliau capai diantaranya berhasil menekan arus perdagangan yang dijalankan oleh orang Eropa juga telah mampu membenahi dan mengadakan konsolidasi di berbagai sektor; baik ekonomi, politik, sosial budaya dan kehidupan beragama. Di bidang politik, ia telah berhasil mempersatukan seluruh lapisan masyarakat di Aceh sehingga muncul istilah untuk penyebutan *kawom* seperti ; *kawom lhee reotoih* (kaum tiga ratus), *kawom tok batee* (orang-orang Asia), *kawom manteu*, Batak Karo, Arab, Persia dan Turki, *kawom Ja sandang* (orang-orang mindi) dan *kawom Imam peueut* (Imam empat). Begitu pula pada masanya telah tersusun sebuah undang-undang tentang tata pemerintahan yang diberi nama *Adat Meukuta Alam*; hukum adat ini didasarkan pada hukum Syara". Dibukanya Bandar Aceh menjadi Pelabuhan Internasional merupakan

⁷Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).Hlm 32.

langkahnya yang progresif dalam upaya memakmurkan perekonomian negeri, sebab dengan *open sistem* tersebut segala hasil kekayaan Aceh, terutama lada, dengan mudah dapat menembus pasaran baik yang berskala nasional maupun internasional. Di sisi lain kemajuan juga berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan. Menurut B. Schiere dalam bukunya "*Indonesian Sociological Studies*" mengatakan : Aceh adalah pusat perdagangan Muslim India dan ahli fikirnya yaitu tempat berkumpulnya para cendekiawan dan ulama-ulama sehingga saat itu Aceh menjadi pusat kegiatan studi Islam.

Adapun lembaga-lembaga kajian ilmiah yang berkembang adalah:

- a. Balai Setia Ulama (jawatan pendidikan)
- b. Balai Jama'ah Himpunan Ulama' yang merupakan studi *club* yang beranggotakan para ahli agama.
- c. Balai Setia Hukama (Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan).

Sedangkan lembaga pendidikan yang berkembang adalah :

- a. *Meunasah* (Ibtidaiyah)
- b. *Rangkang* (Tsanawiyah), untuk pendidikan tingkat ini tempat belajarnya di masjid dan yang dipelajari adalah kitab-kitab Ilmu Hisab, Al-Qur'an, Ilmu Falaq, Fiqih dan Hadits.
- c. *Dayah* (Aliyah), pendidikan tingkat ini berpusat di masjid-masjid besar.
- d. *Dayah Teungku Chik* (Perguruan Tinggi), di sini diajarkan Tafsir, Tasauf dan lain sebagainya.

Ilmu Tasauf (mistisisme) adalah salah satu kajian keagamaan yang mendapat perhatian oleh Pihak Sultan sehingga pada masanya tercatat banyak ahli sufi, di antaranya: Hamzah Fansuri,

Syamsuddin as-Sumatrani dan Nuruddin Ar-Raniri. Dapat dibayangkan betapa gemilang Aceh Darussalam di masa keemasan yang dibimbing dan diarahkan oleh Sultan Iskandar Muda. Ini merupakan suatu indikasi dari suatu usaha apabila diupayakan dengan segenap perhatian dan keseriusan akan membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Maka wajar jika Aceh saat itu menjadi batu sandungan bagi Imperium Barat yang berusaha mencengkeram seluruh wilayah Nusantara secara utuh ; baik itu Belanda, Inggris maupun Portugis.⁸

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa catatan sejarah Aceh menyebutkan bahwa pada abad ke-16 dan 17 kesultanan Aceh Darussalam benar-benar menjadi pusat percaturan politik dan ekonomi yang berskala nasional maupun internasional. Pada masa itu, Bandar Aceh Darussalam sebagai kota yang sangat dinamis dengan berbagai aktivitas konstruktif yang tidak saja menyangkut politik dan ekonomi, di samping pembangunan peradaban ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta militer. Aktivitas ini menjadi pusat perhatian negara-negara lain untuk berkunjung ke Aceh dan bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Aceh.⁹

Dalam percaturan politik antar negara, Kerajaan Aceh Darussalam dapat dikatakan sebagai sebuah kekuatan nyata di kawasan Asia Tenggara, baik politik, ekonomi maupun militer. Sehingga pada permulaan abad ke-16 lahirlah "*lima Kerajaan Islam terkuat dan besar*" yang menggalang kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, militer, dan kebudayaan. Fakta tersebut seperti apa yang diutarakan

⁸Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, (Bandung: Mizan, 2002). Hlm 64.

⁹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 48.

oleh Wilfred Cantwell Smith dalam bukunya *Islam in the Modern History*, Kerajaan Aceh Darussalam termasuk dalam *Lima Besar Kerajaan Islam* di dunia, yaitu:¹⁰

1. Kerajaan Islam Turki Utsmani di Istanbul.
2. Kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara.
3. Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah.
4. Kerajaan Islam Mughal di India.
5. Kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara

Sebagai salah satu dari lima besar kerajaan Islam, Kerajaan Aceh Darussalam menjalankan politik luar negerinya dengan berpedoman pada empat macam diplomasi yang dianutnya, yaitu :¹¹

- a. Diplomasi *Kancil*, kemudian dikenal dengan "*tipee Aceh*" (tipu Aceh) di dunia internasional.
- b. Diplomasi *Meubisan*, yaitu "perkawinan agung" antarnegara.
- c. Diplomasi *Ekonomi*, yaitu diplomasi yang didasarkan pada kekuatan ekonomi untuk mendapat pengaruh dan mencapai tujuan politik.
- d. Diplomasi *Militer*, yakni diplomasi dengan mengandalkan pada kekuatan senjata atau militer.

Keempat macam diplomasi ini dipergunakan oleh Sultan Iskandar Muda

¹⁰Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam: Imperium Turki Utsmani*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1988). Hlm 66.

¹¹Makalah disampaikan pada seminar dengan tema "*Aceh, Nusantara, dan Khilafah Islamiyah*", yang diadakan oleh TIM Cabang Ciputat, BDK HTI UIN, dan IMAPA Cabang Ciputat tanggal 28 Maret 2007 di Meunasah Fatahillah Ciputat. Penulis adalah Dosen IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Alumnus Universitas Leiden, Nederland, peserta program S3 pada Program Pascasarjana UIN Jakarta dan Direktur Yayasan Shabrun Jamil Jakarta.

untuk menjalankan lima pasal program politik luar negerinya, yaitu:¹²

- a. Menguasai seluruh negeri dan pelabuhan yang berbatasan dengan Selat Malaka serta menetapkan terjaminnya wibawa atas negeri itu sehingga tidak mungkin terjadi "*devide et impera*" oleh negara asing.
- b. Menaklukkan Johor supaya tidak dapat lagi ditunggangi oleh Portugis dan Belanda.
- c. Menaklukkan negeri sebelah timur Malaya, seperti Pahang dan Patani yang merugikan pedagang Aceh.
- d. Mengalahkan Portugis dan merebut Malaka.
- e. Menaikkan harga pasaran hasil bumi untuk ekspor dengan jalan memusatkan pelabuhan Samudra ke satu Pelabuhan Aceh dan mengadakan pengawasan secara intensif sehingga kepentingan kerajaan tidak dirugikan.

Kelima kebijakan politik tersebut ditempuh untuk menghadapi bahaya agresi yang haus jajahan yaitu Portugis, Belanda dan Inggris. Berdasarkan lima kebijakan inilah Sultan Iskandar Muda dapat memukul mundur Portugis yang bercokol di sepanjang Selat Malaka. Tentu saja, Sultan Iskandar Muda dalam menghadapi agresi Portugis, Belanda dan Inggris tidak sendiri, tetapi dibantu oleh negara-negara Islam pada masa itu, antara lain adalah Turki yang secara aktif menopang dalam bidang persenjataan dan kemiliteran Kerajaan Aceh Darussalam.¹³

Kesuksesan lainnya adalah pembangunan istana sultan yaitu sebuah keindahan dan kemegahan kesultanan Aceh dapat tergambar dalam uraian naskah

¹²Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Penerbit Waspada, 1980). Hlm 228.

¹³Anthony Reid, *The Blood of The People*. (Kuala Lumpur dan New York: Oxford University Press, 1979).

Bustan as-Salatin: "Syahdan, di darat balai keemasan yang memiliki Balee Ceureumeen (Balai Cermin) di istananya yang megah, di dalam istana ada Mahligai Mercu Alam dan Mahligai Daulat Khana dan Mahligai Cita Keinderaan dan Medan Khayali dan aliran sungai Dar al-Isyki itu suatu dan terlalu amat luas, kersiknya terbuat dari batu pelinggam, bergelar Medan Khairani yang amat luas. Dan pada sama tengah medan itu Gunung Menara Permata, tiangnya dari tembaga, dan atapnya daripada perak seperti sisik rumbia, adalah dalamnya beberapa permata puspa ragam dari Sulaimani dan Yamani".¹⁴

Sultan Iskandar Muda berhasil membangun keharmonisan dan keselarasan dalam menjalankan pemerintahan di Kerajaan Aceh Darussalam. Keberhasilan tersebut menjadi sebuah catatan dalam sejarah Aceh terhadap kejayaan dan kemegahan Kerajaan Aceh Darussalam pada waktu dulu. Tentu saja semua itu terwujud berkat usaha dan kerjasama yang solid antara penguasa dengan pengikutnya. Tanpa adanya rasa keharmonisan dan keselarasan, kejayaan tidak akan dicapai karena selang beberapa periodisasi kesultanan selanjutnya Kerajaan Aceh-pun mulai redup, mundur dan akhirnya hancur. Apabila kehancuran telah terjadi maka hancurlah sebuah peradaban yang telah lama dibangun.

¹⁴Hermansyah, Peneliti Sejarah dan Manuskrip Aceh. Naskah disampaikan dalam Diskusi Publik Memperingati 501 Tahun Kesultanan Aceh Darussalam, Banda Aceh, Sabtu 31 Maret 2012 yang dilaksanakan Lembaga Budaya Saman. Lisensi Pusat Kebudayaan Aceh-Turki (PUKAT)/*Acheh Turkish Culture Center* (ATCC).

Penutup

Jalinan keharmonisan dan keselarasan yang kuat antara Sultan Iskandar Muda dengan rakyatnya telah menuai kesuksesan yang luar biasa baik di tingkat regional maupun internasional. Keberadaan Kerajaan Aceh Darussalam yang strategis di Selat Malaka telah membuka jalan untuk menjalin hubungan diplomatik dan sekaligus kerjasama dalam bidang perdagangan, sosial dan politik baik tingkat regional maupun internasional. Rasa keharmonisan dan keselarasan juga telah berhasil membawa Kerajaan Aceh Darussalam dan kerajaan-kerajaan taklukannya untuk bekerjasama mengusir kafir penjajah di Nusantara terutama di sekitar Selat Malaka.

Rasa keharmonisan dan keselarasan yang dibina antara Kerajaan Aceh Darussalam dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya didukung juga oleh ikatan persaudaraan yang seiman dan seagama serta dengan ikatan *ukhuwah Islamiyah*, semangat ini telah memberikan kontribusi besar dalam mempercepat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Dengan adanya keselarasan tersebut Kerajaan Aceh Darussalam telah mampu membangun beberapa peradaban Aceh yang bermartabat meliputi ilmu pengetahuan, lahirnya pakar-pakar Islam, diplomasi politik luar negeri dan pembangunan berbagai sarana infrastruktur kerajaan yang megah pada masanya.

Cut Zahrina, S.Ag. adalah Peneliti Muda Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

Local Wisdom, Instrumen Peredam Konflik

Oleh : Titit Lestari

Pendahuluan

Salah satu isu yang sering dibicarakan dalam masyarakat dewasa ini adalah isu seputar konflik yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Perbincangan terkait konflik sendiri kemudian dikaitkan dengan peran kearifan lokal terhadap berbagai isu strategis yang berkembang. Salah satu topik strategis yang marak dibicarakan adalah peran kearifan lokal terhadap alternatif penyelesaian sengketa masyarakat.

Kearifan lokal sering diidentikkan dengan kearifan budaya, termasuk nilai-nilai adat dan budaya lokal setempat. Quaritch Wales (dalam Ayatrohaedi, 1986:18-19)¹ menyebut kearifan lokal tersebut dengan menggunakan istilah *local genius* (kearifan lokal). Kalangan yang sering kali mengidentikkan kearifan lokal sebagai "*local genius*" atau "*local wisdom*" mengasumsikan bahwa budaya dan adat lokal memiliki nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Berdasarkan asumsi tersebut maka setiap budaya lokal memiliki kearifan lokal yang identik dengan sebutan "*local genius*" atau "*local wisdom*".

Kearifan lokal ternyata tidak hanya sekedar identitas dan produk, namun juga mengandung nilai-nilai (*value*) sebagai tuntunan hidup bagi yang memiliki maupun yang menjalaninya. Salah satu contoh menarik adalah kearifan lokal suku Mandailing dalam Tari Tor-Tor. Dalam

pengertian terbatas, Tari Tor-tor dapat dimaknai sebagai benda artefak (benda nampak) atau lebih tepatnya hanya disebut sebagai suatu tontonan. Namun dalam pengertian luas, Tari Tor-tor diartikan sebagai kata kerja (bukan kata benda) yang memiliki makna. Dengan kata lain, Tari Tor-tor merupakan nilai-nilai berupa tuntunan (bukan sekedar tontonan). Dan nilai-nilai yang berupa tuntunan tersebutlah yang dinamakan kearifan lokal.

Konflik dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan antarindividu atau kelompok untuk memenangkan sesuatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Kekalahan atau kehancuran pihak lawan dilihat oleh yang bersangkutan sebagai suatu tujuan utama untuk memenangkan tujuan yang ingin dicapai. Berbeda dengan persaingan atau kompetisi yang memiliki tujuan utama: pencapaian kemenangan melalui keunggulan prestasi dari yang bersaing, maka dalam konflik, tujuannya adalah penghancuran pihak lawan. Karena itu, tujuan untuk memenangkan sesuatu yang ingin dicapai acap kali menjadi tidak sepenting keinginan untuk menghancurkan pihak lawan.² Sikap dan perilaku merupakan unsur pokok dalam memahami situasi konflik yang terjadi dalam masyarakat. Seringkali kita mengalami kesulitan untuk mengenal pandangan atau tindakan tentang suatu konteks atau peristiwa penting. Masing-masing pihak akan berpegang terhadap asumsi dan kerangka pikir masing-masing. Hal ini pula menyebabkan konflik terus terjadi karena masing-masing pihak sulit untuk menerima

¹Ayatrohaedi. *Kepribadian Budaya Bangsa (Lokal Genius)*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985).

²Parsudi Suparlan, *Jurnal Antropologi Indonesia Vol. XXIII, No. 59, 1999, Jakarta, hlm. 7-19.*

sikap dan pandangan yang berbeda. Hal ini pula yang mendorong sebagian kelompok tetap pada pendiriannya tanpa melihat kepentingan orang lain, bisa saja memberikan nilai positif tentang sesuatu yang dipertentangkan.

Local Wisdom

Local wisdom atau kearifan lokal menurut Moendardjito (1986:40-41) didefinisikan sebagai unsur budaya daerah. Berdasarkan definisi tersebut maka budaya lokal suku Mandailing memiliki bentuk kearifan lokal. Salah satu bentuk kearifan lokal tersebut, yaitu *Marsisarian*. *Marsisarian* artinya adalah nilai-nilai yang mengandung unsur saling menghargai, saling mengerti, dan saling membantu. Bila terjadi suatu konflik atau pertikaian fisik, maka prinsip *Marsisarian* bertindak sebagai peleraai dalam mengatasi konflik atau pertikaian tersebut.

Aktor yang berperan dalam menjunjung tinggi prinsip *Marsisarian* ini adalah *prominent figure* (tokoh kunci) atau disebut juga ketua adat. Dengan menggunakan pendekatan komunikasi konflik yang dikemukakan oleh Harold Lasswell (1948) serta konsep pendekatan integratif (Fisher & Ury 1981), kami berargumen bahwa peran *prominent figure* atau ketua adat dengan membawa nilai-nilai kearifan lokal melalui pendekatan komunikasi konflik integratif memang dapat menyelesaikan sengketa. Fungsi Kearifan Lokal dalam pandangan John Haba, sebagaimana dikutip oleh Abdullah³, kearifan lokal setidaknya memiliki 6 fungsi:

1. Sebagai penanda identitas sebuah komunitas;

2. Elemen perekat (aspek kohesif) lintas agama, lintas warga, dan kepercayaan;
3. Kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas (*top down*), tetapi sebagai unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat;
4. Kearifan lokal memberi warna kebersamaan bagi sebuah komunitas;
5. Kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkan diatas *common ground* (kebudayaan) yang dimiliki;
6. Kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama menepis berbagai kemungkinan yang dapat meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas yang terintegrasi; (Abdullah, 2008:8).

Membahas mengenai kearifan lokal sendiri, terdapat beberapa definisi kearifan lokal yang beragam. Haryati Soebadio (1986:18-19)⁴ menyatakan bahwa kearifan lokal adalah *cultural identity*, identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Sementara Moendardjito (1986:40-41)⁵ menyatakan

⁴Subadio, Haryati. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa. Dalam Ayatrohaedi (ed.).1986. Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. (Jakarta : Pustaka Jaya). Hlm. 18-19.

⁵Moendardjito, dalam Ayatrohaedi, (ed.). 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986).

³Irwan Abdullah, dkk, 2008, *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta : Sekolah Pasca Sarjana UGM). Hlm. 8.

bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai kearifan lokal karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Dengan kata lain, maka Haryati Soebadio dan Moendardjito termasuk akademisi yang percaya bahwa kearifan lokal bersumber dari budaya lokal. Menurut keduanya kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Budaya Lokal dan Bentuk Kearifannya

Beberapa tahun belakangan ini banyak timbul konflik antar suku, antar pemuda, antar kelas yang berbasis pada perbedaan. Hal tersebut sangat mengoncang pertahanan bangsa Indonesia. Sangat miris terdengar jika kita kembali mengingat akan semboyan yang bangsa Indonesia mengenai perbedaan. Keunikan dari bangsa kita, selain keindahan perbedaan seni, juga keindahan pola pikir dan perbedaan dalam cara menjalani kehidupan masing-masing. Salah satu contohnya adalah kearifan lokal yang dihasilkan oleh setiap kelompok masyarakat tradisional dalam penyelesaian konflik.

Sebagai contohnya, dalam masyarakat adat Batak terdapat *Dalihan Na Tolu*, suatu falsafah hidup masyarakat adat Batak yang sangat kuat yang merupakan adat istiadat yang bertalian erat dengan sistem kekerabatan suku Batak. Secara harfiah *Dalihan Na Tolu* berarti tiga tungku yang dianalogikan dengan tiga tungku-masak di dapur tempat masak. Demikian halnya masyarakat Batak yang mempunyai tiga tiang penopang dalam kehidupan, yaitu (1) pihak semarga, (2) pihak yang menerima istri, (3) pihak yang memberi istri. Melalui perkawinan terjadilah ikatan dan integrasi di antara tiga pihak yang tersebut, di mana mereka umpama tiga

tungku di dapur yang besar gunanya dalam menjawab persoalan kehidupan. *Dalihan Na Tolu* dapat dibentuk dalam mengatur mekanisme integritas dan identitas antar marga di suatu *huta* (kampung). Masyarakat Batak meskipun telah berkembang melintas batas daerah Batak tetap memegang teguh konsep dasar adat *Dalihan Na Tolu*. Hal ini bisa terwujud karena mereka amat menjaga adanya etika. Hubungan kekerabatan dalam adat Batak sangat luas yang dapat dilihat melalui keakraban dan nilai ini sangat mendasar dalam segala pergaulan. Nilai keakraban itu tidak sekedar teori, tapi diaplikasikan dalam bentuk mekanisme sosial adat *Dalihan Na Tolu* sampai sekarang.

Selain konsep *Dalihan Na Tolu* terdapat konsep *marsisarian* yang berarti saling mengerti, menghargai, dan saling membantu. Di dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga kita saling membutuhkan pengertian atau toleransi, bukan saling menyalahkan. Bila terjadi konflik di antara kehidupan sesama masyarakat maka yang perlu dikedepankan adalah prinsip *marsisarian* yang merupakan antisipasi agar konflik tidak merusak. Pertahanan bangsa pun bisa dimulai dari kelompok-kelompok masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Penutup

Berdasarkan beberapa argumen mengenai definisi kearifan lokal di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya lokal seperti Tari Tor-tor, *marsisarian* dan *Poda Na Lima* (lima nasehat) termasuk ke dalam bentuk kearifan lokal. Beberapa contoh menarik untuk menjelaskan bentuk kearifan lokal tersebut adalah, jika terjadi suatu pertikaian atau konflik diantara sesama warga, kedua belah pihak akan memilih seseorang sebagai mediator (biasanya ketua adat), mediator atau ketua adat ini kemudian memediasi pertikaian

dengan menggunakan nilai budaya *marsisarian*. *Marsisarian* adalah nilai-nilai yang mengandung unsur saling menghargai, saling mengerti, dan saling membantu. Nilai budaya *marsisarian* ini bertindak sebagai penengah dalam mengatasi pertikaian atau konflik tersebut.

Demikian pula dengan cerita masyarakat lokal Mandailing yang memegang teguh nilai-nilai *Poda Na Lima* (lima nasehat) dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya nilai *Paias Pakaranganmu* atau bersihkan pekaranganmu. Nilai budaya tersebut menjadikan masyarakat Mandailing turut menjaga dan melestarikan lingkungan disekitarnya, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan lain-lain. Bentuk kehidupan semacam ini adalah gambaran nyata yang ada di masyarakat Mandailing, dan kearifan yang ada di sana adalah bentuk dari kearifan lokal berdasarkan budaya lokal Mandailing.

Aktor yang berperan penting dalam penyampaian bentuk kearifan lokal tersebut adalah *prominent figure* (tokoh kunci) yang biasanya adalah ketua adat. Ketua adat, yaitu seseorang yang dituakan yang memiliki wewenang dan dianggap paling memahami bentuk adat dan budayanya. Artinya, pada setiap kearifan lokal yang ada, tidak terlepas dari peranan ketua adat dalam membawa dan mengamalkan kearifan lokal budayanya. Baik itu dalam ruang lingkup sempit (pada masyarakat di sekitarnya) maupun dalam ruang lingkup luas (pada masyarakat luar).

Argumen di atas sangatlah tepat, menyatakan bahwa kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Dengan kata lain, kearifan lokal merupakan bentuk atau sebuah produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan sebagai pegangan hidup. Meskipun bentuknya bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

Kearifan lokal adalah sebagai suatu sintesa budaya lewat proses yang panjang, melalui internalisasi dan interpretasi agama (sehingga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama) yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat di wilayah tertentu. Berfungsi sebagai elemen perekat, dan mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama dalam menepis dan menangkal berbagai kemungkinan yang dapat meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas yang terintegrasi. Begitu pentingnya posisi, peran dan fungsi kearifan lokal itu, sehingga apabila dipedomani dengan benar dan difungsikan sebagaimana mestinya akan mampu memberikan kontribusi positif dalam pemecahan masalah termasuk meredam konflik.

Titit Lestari, S.Si.. adalah Peneliti Muda Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

“Pageue Gampong” Dalam Masyarakat Aceh

Oleh : Yulhanis

Pendahuluan

Pageu Gampong merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh. Istilah tersebut terdiri dari dua kata yakni *Pageue* dan *Gampong*. *Pageue* artinya pagar dan *Gampong* artinya kampung yang juga didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat. Secara harfiah *Pageue Gampong* di sini tidak berarti membuat pagar di kampung atau menunjuk sejumlah orang untuk menjadi penjaga keamanan kampung, akan tetapi *Pageu Gampong* dimaksudkan sebagai suatu sistem tata kehidupan bersama yang bersifat protektif untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan kemasyarakatan dalam suatu wilayah yang juga disebut *gampong*.

Gampong itu sendiri merupakan istilah khusus di Aceh yang dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah *Mukim* atau yang menyebut wilayah tertentu yang di pimpin oleh *Keuhiik* dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya masing-masing.¹ Sebutan ini dapat dipahami sebagaimana istilah *Nagari* di Sumatera Barat atau secara lebih umum dikenal dengan istilah Kelurahan. Satu *Gampong* terdiri atas beberapa wilayah kemukiman. *Gampong* dipimpin oleh *Keuchik*. *Keuchik* tersebut mengemban tugas sebagai pemuka adat selain mengurus urusan administrasi pemerintahan.

Realitas kehidupan masyarakat Aceh, *Gampong* tetap berada dalam

lingkungan adat istiadat, meskipun masuknya pengaruh budaya tidak terelakkan. Mereka tetap memelihara tatanan kehidupan masyarakat dalam ikatan kebersamaan yang berprinsip pada ketenangan, kerukunan dan kedamaian sebagai pola kehidupan sejahtera. Masyarakat Aceh tidak ingin terusik oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap lain, sehingga setiap persoalan yang mengganggu kehidupannya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat secara damai, salah satunya yaitu melalui *Pageu Gampong*.

Struktur dan Fungsi *Pageu Gampong*

Dalam kehidupan suatu komunitas masyarakat, pasti mengalami apa yang disebut dengan perselisihan. Tidak ada komunitas yang terbebas dari masalah. Di kehidupan sosial, pergesekan adalah hal yang lumrah terjadi, namun untuk meredam masalah-masalah itu diperlukan media yang bertugas sebagai kontrol sosial yang menyeimbangkan keadaan, agar pergesekan tidak berkembang menjadi hal yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu lah *Pageu Gampong* ini terbentuk sebagai institusi sosial yang hadir untuk menjadi pengontrol aktivitas sosial yang terdiri atas aparatur adat di setiap *Gampong* di Aceh.

Pageu Gampong terdiri atas aparatur adat dan pemerintah yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti *Keuchik*, *Imum Meunasah*, *Tuha Peut*, *Imum Mukim*, dan *Tuha Lapan*. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi satu sama lain.

1. *Keuchik* sebagai Kepala *Gampong* (desa) menjalankan tugas-tugas

¹Badruzzaman Ismail, *Peradilan Adat Di Gampong dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Majelis Adat Aceh, (Banda Aceh: Buletin Jeumala No. XVI Desember 2005).Hlm. 20.

pemerintahan dan tugas kemasyarakatan. *Keuchik* sebagai pemimpin masyarakat adalah tokoh yang dihormati berdasarkan agama dan kejujurannya. Tugas dari *Keuchik* yaitu: memimpin penyelenggaraan pemerintahan *gampong*, membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syariat Islam dalam masyarakat, menjaga dan memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat, menjadi hakim antar penduduk dalam *gampong* bila terjadi sengketa. *Keuchik* mewakili *gampong*-nya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya. Dalam sejarahnya, *Keuchik* berfungsi menjalankan tugas *Uleebalang* di tingkat *Gampong*, *Keuchik* harus mampu memecahkan masalah-masalah dan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. *Keuchik* dalam masyarakat Aceh mewakili *Umara*, para cerdik pandai yang memiliki wewenang menghimbau dan mengatur masyarakat, juga menjadi ulama yang menuntun masyarakat dalam kehidupan beragama.²

2. *Imum Mukim*

Istilah *Imum Mukim* berasal dari bahasa Arab, yaitu; imam artinya orang yang harus diikuti (pemimpin). Sesuai sejarah pembentukan mukim, *imum* itu barang kali mula-mula menjadi pemimpin waktu sembahyang/shalat jum'at. *Imum* itu hanya menjadi kepala mukim saja sedangkan untuk memimpin sembahyang/shalat jumat diangkat pegawai khusus. Adapun *imum Mukim* tugasnya berfungsi

menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum adat, bidang pemerintahan, adat istiadat dan menyelesaikan segala permasalahan sengketa yang ada dalam kemukiman.³

3. *Imum Meunasah* atau disebut juga *Teungku Meunasah* adalah orang yang menjalankan seluruh urusan yang berkaitan dengan bidang keagamaan, mengajar anak-anak dan masyarakat mengaji Al-Qur'an maupun memimpin masyarakat shalat di *meunasah*. *Teungku Meunasah* atau *Imum Meunasah* bertugas memegang urusan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan yang aktivitasnya dipusatkan di mesjid atau *meunasah*. Dalam adat ia juga berperan penting dalam memberikan pertimbangan dan kebijakan dalam perspektif agama atas aktivitas masyarakat.
4. *Tuha Peut* yaitu orang yang di tuakan dalam *gampong*, yang tugasnya memberikan bahan pemikiran dan nasehat bagi *keuchik* dan masyarakat *gampong*, *tuha peut* (empat orang yang dituakan) ada beberapa unsur dalam *tuha peut* yakni: ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di *gampong*. Di antara seluruh masyarakatnya yang dipandang cakap, berakhlak mulia, berpengalaman dan berwibawa untuk mendampingi *keuchik* sebagai penasehat dalam berbagai bidang, termasuk menjadi anggota musyawarah dalam sengketa masyarakat *gampong*.⁴ *Tuha Peut* berperan dan bertugas membahas *reusam gampong* bersama *keuchik*, meningkatkan upaya pelaksanaan syariat Islam dan adat dalam

³Misri A Muchsin, *Eksistensi Tuha Peut dalam Lintasan Sejarah Budaya Aceh*, (Banda Aceh; Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2012).Hlm.101.

⁴Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, Cetakan Pertama, 2008).Hlm. 298.

²Seno dkk, *Sejarah Keberadaan Gampong di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, (Banda Aceh. Buletin SUWA No.7 Tahun 2005).Hlm. 51.

masyarakat, memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat, melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *keuchik* atas *reusam gampong*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah *gampong*, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan dengan peraturan tata tertib *Tuha Peut gampong*.

5. *Tuha Lapan* lembaga ini bergerak sebagai alat kelengkapan *Gampong* dan *Mukim* yang terdiri dari unsur pemerintah desa, unsur agama, unsur pimpinan adat, pemuka masyarakat, unsur cerdik pandai, unsur pemuda/wanita dan unsur kelompok masyarakat. Tugas dan tanggung jawab lembaga ini menjadi fasilitator dalam menangani masalah-masalah yang terkait dengan maju-mundurnya pendidikan dan pengajaran masyarakat. *Meunasah* merupakan pusat komunikasi sosial secara informal. Pendidikan yang dilaksanakan melalui *Meunasah* merupakan pendidikan dasar bagi masyarakat Aceh.

Implementasi Pageu Gampong dalam Masyarakat Aceh

Pageu Gampong mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sejenis peradilan yang pimpinannya adalah *keuchik*, untuk bertindak sebagai badan hukum atas nama pemerintahan *gampong* dalam berhubungan dengan pihak luar. Di sini dapat kita lihat beberapa contoh yang di kerjakan oleh masing-masing *pageu gampong*. Dalam masyarakat Aceh ketika menyelenggarakan upacara adat perkawinan, upacara baru boleh dilaksanakan, jika sudah diadakan musyawarah yang dipimpin oleh *keuchik*. Yang pertama diawali dengan *cah roet*

sebagai tahap pertama melamar dengan perantaraan *keuchik* dan pihak keluarga calon mempelai pria. Kemudian pihak *lintobaro* memberikan *seulangke* (utusan) dengan membawa sirih, membawa emas dua mayam, dalam acara pertunangan ini akan membahas mahar dan menentukan hari untuk acara pernikahan.

Sebagai contoh lainnya ketika sebuah keluarga mengalami musibah kematian, setiap ada kematian warga di suatu desa secara spontan setelah pemberitahuan dengan memukul beduk di *meunasah*, masyarakat berduyun-duyun mendatangi rumah duka, sebahagian langsung menangani proses *tajhiz* jenazah (memandikan, mengafankan dan menguburkan) sementara sebahagian masyarakat menyediakan makanan untuk tamu-tamu yang datang. Bentuk prosesi yang disebutkan itu terlihat betapa hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Aceh masih sangat kuat, di sini juga adanya perantaraan para *imum meunasah* dan *keuchik* dalam membantu masyarakat jika terjadinya musibah.⁵

Demikian pula peran serta *tuha peut*, dibantu *keuchik* dan *imum meunasah/teungku* dalam menyelesaikan berbagai persoalan. *Tuha peut* sebagai peradilan *gampong* menyelesaikan masalah sengketa perdata misalnya perihal perbatasan tanah, pembagian harta waris dan hutang piutang, sedangkan sengketa pidana menyangkut dengan pembunuhan, perkelahian dan pertengkaran yang menyebabkan tumpah darah atau hilangnya nyawa seseorang, maka di perlukan perdamaian. Maka para *tuha peut*-lah lembaga inilah yang mendamaikan masyarakat mulai dari persoalan sengketa harta, pertengkaran dalam keluarga sampai pada perkelahian massal dalam dan antar *gampong* yang menyebabkan tumpah darah atau sampai

⁵Raihan Putri, *Pembedayaan Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Budaya*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), 2008, hlm. 30.

pada menyebabkan kematian satu anggota masyarakat. Dalam pencapaian perdamaian dimaksud di Aceh dikenal dengan istilah-istilah *diet*, *sayam*, *suloh*, *peumat jaroe*, dan *peusijuek*. Masyarakat Aceh menganggap belum sempurna penyelesaian pidana melalui *diyut*, *sayam* dan *suloh* bila tidak dibarengi dengan *peusijuek* dan *peumat jaroe*.⁶

Dari dimensi sosial ekonomis, *pageue gampong* diimplementasikan dengan sikap dan tindakan membantu satu sama lain. Suatu masyarakat akan merasa malu misalnya kalau ada anggota masyarakat yang jadi pengemis, secara sistematis oleh *pageu gampong* akan diusahakan mencari jalan keluarnya dan pencegahannya. Contohnya: jika ada warganya kurang mampu dan tidak punya pekerjaan untuk menafkahi keluarganya, maka di sini ada peran serta *keucik*, *imum mukim* dan *tuha peut* mencari solusi untuk membantu warganya dengan memberikan modal ala kadarnya, mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakatnya, agar dia dapat hidup lebih layak.

Dari dimensi hukum (adat) secara sistematik akan terjadi saling mengontrol satu sama lain untuk mencegah terjadinya pelanggaran adat, mencegah perbuatan yang berakibat terganggunya keamanan dan ketentraman hidup masyarakat. Dalam konteks ini dimungkinkan saling mengingat satu sama lain. Seseorang tidak hanya bisa mengontrol anggota keluarganya, tetapi juga bisa mengontrol tetangganya dan anggota masyarakat lainnya. Contohnya : jika ada diantara warganya yang suka berbuat kejahatan seperti mencuri, terlibat narkoba, judi dan mabuk-mabukan minuman keras, dan lain-lain. Maka disini peran serta tetangga dan

masyarakat sekitarnya untuk menasehati warganya yang terlibat kejahatan, tetapi juga harus ada peran serta dari *keucik*, *imum meunasah* dan *tuha peut* dengan bermusyawarah dengan keluarganya, untuk mencari solusi agar warganya kembali ke jalan yang benar.

Peran yang dilakukan *pageue gampong* adalah untuk menyelesaikan konflik yang timbul di tengah masyarakat. Pada prinsipnya penyelesaian setiap sengketa atau perkara yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat, baik pada tingkat *gampong* maupun pada tingkat kemukiman. Adanya kewenangan *keuchik* dan *imum mukim* untuk menyelesaikan perkara secara damai dalam masyarakat mempunyai dampak yang positif baik bagi para pihak yang bertikai, yaitu terciptanya kerukunan dan kedamaian di antara keluarga dan terhindar dari rasa dendam yang berkepanjangan. Contohnya : perihal harta warisan, dalam satu keluarga antara satu dengan lain biasanya sering bertikai dalam memperebutkan harta warisan yang sudah dibagi, di sinilah perlunya kewenangan *keucik*, *imum mukim* dan *tuha peut* dalam menyelesaikan masalah warisan dengan bermusyawarah dengan seluruh anggota keluarga ahli waris, mencari solusi secara damai agar tidak menimbulkan dendam dan pertikaian lagi, sehingga para ahli waris mendapat warisan secara merata dan adil.

Dampak Menghilangnya Peran *Pageu Gampong* di tengah Masyarakat Aceh

Peran *pageu gampong* dalam masyarakat Aceh dulunya sangat dibutuhkan namun sekarang peranannya sudah semakin hilang. Sebagian masyarakat Aceh sekarang jika menghadapi masaalah, mereka mengambil jalan keluarnya secara kekeluargaan diantara dua belah pihak, dan didamaikan antar keluarga. Sering kita lihat perkara

⁶Mukhlis PaEni, dkk, *Dinamika Masyarakat Aceh Pasca Tsunami*, (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata), Tahun. 2009, hlm. 42-43.

pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan diselesaikan melalui penyelesaian adat antar keluarga di *gampong-gampong*. Paling tidak penyelesaian adat itu dapat digunakan hakim untuk mengurangi hukuman pidana terhadap si terhukum. Peran serta *pageu gampong* dalam masyarakat aceh juga semakin tidak terlihat lagi, kalau setiap permasalahan tidak ada keterlibatan *pageu gampong*, maka permasalahan itu tidak akan berlarut-larut. Yang diinginkan oleh masyarakat sebenarnya lebih dititikberatkan bukan pada penegakan hukumnya, tetapi pada nilai-nilai ketenteraman dan kedamaian masyarakat. Penegakan hukum pengadilan tidak akan bisa memecahkan masalah, seringkali hanya memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar warga masyarakat yang berpekar.

Penutup

Dalam pelaksanaannya secara formal *pageu gampong* sampai saat ini masih tetap diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat Aceh. Kita berharap agar dalam masyarakat diterapkan penegakkan peradilan adat secara penuh di *gampong* dan mukim di Provinsi Aceh. Penegakan

Peradilan Adat sekaligus memberi dampak pada kebudayaan kembali *pageu gampong* sebagai benteng pertahanan, pembinaan akhlak dan Kamtibmas untuk pembangunan harkat dan martabat seluruh masyarakat Aceh juga bagi generasi masa depan.

Sebagai suatu sistem yang ideal *pageu gampong* patut diperkuat karena terbukti efektif mencegah terjadinya pelanggaran hukum (adat) dan efektif menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan masyarakat. *Pageu gampong* yang merupakan lembaga adat di *gampong* perlu dihidupkan kembali. Karena dengan adanya *pageu gampong* ini bisa menjaga suasana keamanan, ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga.

Revitalisasi *pageu gampong* tentunya memerlukan kepatuhan dari masyarakat dan kewibawaan dari pemimpin *gampong*. Masalahnya kewibawaan *keuchik* yang membuat masyarakat hormat telah berkurang bahkan hilang.

Yulhanis, S.Ag., adalah Pamong Budaya Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

BOI BILE HUKU

Adalah legenda yang berasal dari pulau Nias Provinsi Sumatera Utara yang menceritakan kisah antara Bae, Laosi dan Razo. Kisah ini sangat menarik karena mengandung nilai-nilai edukasi dan moralitas sebagai pembentuk karakter bangsa yang adiluhung.

Samura maokho mofano lao si wonoro-noroi uli dano ba wofani-fanonto bafalukka ira Laosi na bage mbae, ba umbena Duha. Bambena duha oya sibai ngawalo imbua zinano sasobi dododa wamargi yara dao, dima, magi, duris, lase, magabatano boo nia. Baginto, "dao tepandu ngaluo lokho ba aukhu goi, meno fakhika ira laosi imbae nomege ba lalau fawnde wnde, ba mboro gen-boro me ankhu goi zino ba lalau molombase. Siofona na ioponoo ia Laosi manari ia ia moloo sino tooo yaia, sumanem manaoka ia badano, ba hewisa lagu namanari ira. Meno aya ioramo wananario Laosi gei iromagoi hewisa waatoolonia, manoi ia ba mengaule ia bandraha gen, ba ipema ndraha gen bae no magemanaoka ia ba ndraha gen tano boo, simano waundasera darno ira Laosi ibae, gasa-gasa wolombare ba mboro gen dao. Baginoto wang oro mao mbae faabolonia, ba oya ifalee kho laosi hi sisa zitooli yaira, yang doa ilau pakea koro fanutu alogoi, enao asan zamaigi yaio.

Meno aefa waundaresa ba mano erege dodorswa erege hokhwasa, awowangoromao faaboloro zamosona via ba mudadao ira ba mboro gen baginoto wolombasen ba lalau faunde-faunde ba lala hede-hede.

Ba wamoi kholo-kholo mbae yaio ba itaro horoma gen sowna, buania ausi simane uli mbalalu mane Bae He!. Laosi hadio zamso andro yawo ba hoju gen dao. O thema lonia laosi unnane.

Bua undrina aya duha dao bae.

Bae : imane kho lausi. He! Laosi dataton mbua ndrime dao la taila na ami nosima ba naloo, sino wrongo rongo la faoma ira

waosikhi guli nosi, he sokhi guli banali sokhi nosi he sokhi gulima, maroi baero ba maafeto dod ba wamargi. Ba malo faoma ira wa asokhi guli waami nosi.

Laosi : "Itama li mbae laosi, imane simanefaaookhi waimangida uli sumono goi wa ami nosi faleha ato to dau mbua magi afeto guli ba ami nosi, tobal bua undrina dao. Asibi doodedo wamaigi uli ba aiso soboi bakha nosi. Hawaee simano ba lo dozi niho tola manen bara ndrime dao boro me dima dao okho ta duha (razo) asofuhamiho mano zanan yaira ba ihuku razo la mendruna mano nai me razo dao sabbe sibai huku".

Bae : Imane bae leho, "Raosi hadia ba wa ngetuono huku andro ba iboro mano ziduhu?"

Laosi : Huna li mbae laosi wangumao sumano, "molo sino krongo".

Bae : Imane bae kho Laosi, lao ba meno sumano, ba akka lo saten ia so, i nisefnu kon ia daa, na laten mbua gen do, hezo ziofana mururu ma mukoko.

Laosi : imane Laosi, moloo sino urango bae ba fefu mbua ngen na laten ba ofona mururu awena mukoko.

Bae : Imane kho mbae Laosi lo duhu lehon doo moloo ni rogogu ba ofona mukoko awena maruru. Boro "me tebai laila lahilo wahasara dodo ba tebai goi sogang etula ba zmanarara doo, lahilo gegetula, wagumao lau ba meno sumano dao melo taila hezo

zatulo ba dasafuli yumo razo ba mbanua wanofu khoma haniha zatulo ba hezo amdruhu ba gotaluaada andra. Fatua lo mofano ira ba fawnli ira wangumao haniha zi kala ba gota luada andre ba hadia itehejo ia moi tobali ndrivo razo. Faiuli ira taira sidarna ba forma fatkhe dodora. Fofanora ba faoma lasoro lalara zamosana ira, boro zbolo mbae wamaema hoju gen dao wa alio irugi yomo khozaro Bae tola mano lo itoro dano boro. Manaoka.....ia ioroi hogu gen sisagen adolo ba hogu gen si sagen, fofano Laosi ba isaro zaio solua asu, meno irugi yomo lho razo ba ba iamo-duno hadio daniwa moiza wangonhoroni raro, umamaneakhoo wangundarasi yango badae yamo razo, ba sogana zobina ma darina undaraaga Laosi, ba wnde-wandena ba wahede, ba so zilo faoma ahona dodoma faoma fasambai. Amazobiana aoma Indraag a Laosi yaia dao, moila mege mbua udrina sasono ba hogu, ba amane lehe Laosi, he Laosi nalaten mbua gen dao ba hezo ziofona ira maruru mukoko ba itemaligu Laosi andero ba lo asuli moloo yasdo, sino urongo ofona mukoko awena maruru, Boro melo faoma fasehe dodoma ba zonara dodomo andre. Do wamaholo gange tula wa teabilo sakhi natasao kho raza yomo gama zabina dodoro andre. Ba fatua lo oombakhao hezo zindruhu razo ba moguna goi mombakhoi khaou wa no fawinli naraga megewa hamina aima zikalo ba ilulu waari nia tobali ndrivo razo.

Razo Meno sefa isusuno Bae, ba itama linia razo, imane wangumao fefu gofu hadia ngawaloi mbua

gen niteu, ba ofona maruru awena mukoko, dao zatulo ba sindruhu nahaniha ba gotaluo mi zangumao, ofona mukoko awon doo zipasalo.

Bae : Imane Bae kho razo: He...razo, meno oombakhan zindruhu ba no saoe wa yao zifasala.

Ha awai yai razo, angerazona, hadia tebai ahokko si todo unraoi hadiolo ogoroo wamaigi, ba hadio lo anuzu aodon wanaba yaodo toboh ndrion, Laosi nai ebuai dawi ba no adabi-dobi lo maniasa undrango na otab ia ndrion, Laosi nai ebuai dawi ba mangalole, yaodo ba afus sibai, hakhosi kodo ndrao razo.

Meno awa iombakhao khorazo, Bae wa abolosokhina Laosi taba ndrion, boro esolo ba atabo goi-lo ara bano tohare Laosi.

Kho razo na aboso-basa ma bobonia boro me erege sibai dodoma ba lala fono, ba me irugikho razo ba asobi dodo wamaigi tangaen nia boro mee no aboso ia boboi ba hulu nilau fanikho mbumia. Ba onoma goi wa atabi sibai wamagi razoyaia Meno ara maifu ingi ba irugi ba isafu khona pazo hanawa so ndrango?

Laosi : Itameli razo Laosi razo imane wangumao, " Lau no aboto sae bodo dogu hadia gama zobiwani, yaia doina asorumbua ndrion ba hezo ziofona maruru mukoko.

Razo : fatua lo nambakha ziduhu iba hanika zatulo ibagota enami, ba manof ndroo khoiina. Hadia no fawinli ami mege fatualo, mofa no, ami touhanika zikala ba utaba ia ndrion o nano fauinsa li dao ba matema ligu Noa. Bawa nofu razo nemege ba faoma latama li

dorna ira Laosi ba-ba Bae mangumao noa.

Bagino wanopu-razo nomege ba no mangeroha dodo-mia baro, me satuli tobal sisolo, ba sisalotobali simona, ha boro wamagia fongaeu Laosi bois me atabo wa tobint khonio ziduhu saoe, baioawogo waya.

Razo : Imane, lau ubu saai gangetula ba fatualo mitema gange tula ba mforndrongodrongo.

Manofu razo leharo, mane hamika bogotatua mi zage moa na atoru mbua Nurina ofona, ba hangumao ofona mukoko aweva maruru dao ziduhu, ba sikala ia dao ba ilula ia nariwo razo.

Laosi : Yaodo zangumao dao ba boi saae oyap ngawolo, utaba ndrongo ndr iwogo ia dao.

Bae : Imane leho da bae lau ba mena sumano na lahegu zatuli ba da ulao mafano, ba uturruiaigo ba umbae wa opona maruru, awono mukoko ba fatua lo mofanodo ba nandro srohagolo khau raza Laosi hadia lo sabila huku, balo sisala wangtuo razo boro me aboa dodo razo, ioponuang, irau Lausi ba ibobo, he wae iduhugo wage-ege khoda Laosi balo ifarongoi razo.

Ihalo mbalatu ba idali, erege mauoi u waasaro fatnalo, itaba ia razo, ba mangaroi Laosi khorazo mangumao lao razo wangumai, lau razo mena soae yaado zogona huku, ba isa yai goroisagu khon nano dania orino ndrao ba asesei wamalokka enao mauu wa asiso ndrao.

Enao embuyo ndrao isugi dola, enao tola oa ndrao fabaya tola boro melo bahanio.

Razo : fefu goroisian khogu ba uoo.

Mena saae aefa goroisano nia, kho razo, ba itaba saao ia razo, itatawi manoarefa itatawi ba iramo bawu bagohto, mena mauu aukku ba woi ba mbowao, ba ifalokha Laosi na mege razo, ba wa malokhama ba mboto ba wu mbawoa nomege, ba te zambua dola Laosi nomege babate gaho ba horo razo. "Menotehafu ba horania ba mamaoho ia badalu mbanua lo ula duduna nia iba lo soae ula niha meteboni itaha wa afokho", ba muira-ira mano razo no mege, ba muhola-hola goi golito bawa. Baginoto wevia-vamia ba atoro todonio huku simo retua kero Laosi nomage, ba mangaro-ngaro mamoo ia waafakho, mane mane wangumao alai ndrao ndrango, bae kana wa ofomoho do unge, aboto horogis toballi bahole todogu zagumani, ama nangolo.

Melerango niha sato, we, we iramania ba laondrosi ia niha, oi zaro manofu-nofu dodoniha, wangumao, hodia dao leho duha lo ila imbohkaio tamuka ira waaila waafakho, andro muira-ira mano ia mane. Boi Bila Huku yango di teala bagamuzua, furio awena topacha ba daoa niho geluaha wevia-via razo nomege ba toballi ia fotu irugi maokho ba zamonarongo ba ba zoloo.

Disadur dari: *Cerita Rakyat Daerah Sumatera Utara (Mite Dan Legenda) Edisi Bahasa Daerah*, Medan: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1980-1981, hlm.148-152.



TERBITAN

Dari
**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
BANDA ACEH**

Organisasi Sosial Masyarakat Mandailing di Kota Medan, Harvina, 72 halaman, BPSNT Banda Aceh, 2012.

Organisasi sosial adalah mencakup pranata-pranata yang menentukan kedudukan dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan dalam suatu kumpulan masyarakat tertentu. Organisasi sosial ini menjadi wadah untuk menyalurkan hubungan pribadi antar sesama mereka. Hubungan tersebut dapat berkembang karena hubungan kekerabatan, hubungan wilayah geografis atau tempat tinggal dan karena hasil ikatan antara perorangan berdasarkan keinginan sendiri. Masyarakat Mandailing yang menetap di daerah Medan mereka umumnya membentuk perkumpulan, seperti perkumpulan marga dan perkampungan Mandailing.

Perkumpulan masyarakat Mandailing selama ini hanya berbentuk STM saja yaitu serikat tolong menolong yang hanya bergerak di bidang pengajian dan kemalangan. Oleh karena itu, keinginan yang besar dari masyarakat Mandailing untuk membuat sebuah organisasi yang besar dan kuat yang dapat mempersatukan semua masyarakat Mandailing yang terpecah-pecah di daerah perantauan yang seolah-olah tidak memiliki ikatan. Sehingga lahirlah sebuah organisasi sosial yang bernama HIKMA (Himpunan Keluarga Besar Mandailing). Dari dahulu hingga sekarang HIKMA terus berkembang dalam masyarakat Mandailing di Kota Medan. Informasi selengkapnya dapat diperoleh dalam buku ini yang membahas secara tuntas tentang organisasi sosial masyarakat Mandailing di Kota Medan.

Buku ini diterbitkan sebagai salah satu tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh untuk mengkaji dan mempublikasikan kepada publik tentang tradisi budaya lokal yang berkembang di Sumatera Utara.



**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
BANDA ACEH**

KARTU BUKU

NO. INV. :
NO. BUKU :
PENGARANG : BPNB B.
JUDUL : Bulletin
2013.....

TGL. KEMBALI

16 MAR 2015

04 AUG 2016

25 NOV 2016

30 NOV 2016

31-7-